

### BAB III

#### INTRIK-INTRIK DI DALAM KRATON :

#### 1881 – 1913

Proses intervensi penguasa kolonial Belanda terhadap Kesultanan Yogyakarta bukan hanya terbatas pada institusi resmi, yaitu bidang hukum, politik, dan sosial ekonomi. Pengaruh dan campur tangan kolonial terhadap kerajaan ini juga sangat besar dalam kehidupan elit politik di kraton, bahkan di kalangan kerabat dan keluarga Sultan Hamengku Buwono VII. Peluang ini menjadi terbuka ketika Sultan HB VII terikat dengan kontrak-kontrak politik yang dibuat olehnya dengan Belanda. Selain itu juga sistem kekuasaan yang berlaku di kalangan raja-raja Jawa memungkinkan hal itu terjadi. Hal ini tampak dengan berlakunya struktur pemerintahan raja-raja Jawa, yang mana para raja menempatkan para anggota kerabat dan keluarga dekatnya pada posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan.

Struktur demikian ini memiliki dampak yang luas pada kehidupan politik bukan hanya di kalangan kraton dan elit penguasa tetapi juga pada seluruh sistem kekuasaan di Kesultanan Yogyakarta dan kawulanya. Hal tersebut bertolak dari kenyataan bahwa jabatan-jabatan penting yang dipegang oleh kerabat raja (*sentana dalem*) memberikan lingkaran pembatas yang memisahkan elit penguasa dengan raja sebagai sentral kekuasaan. Di samping itu sistem penggajian para pejabat tinggi ini dengan tanah (sistem *apanage*) juga menciptakan hubungan patron-klien dengan rakyat yang didasarkan pada sistem perabdian feodal (ikatan vertikal). Akibatnya, dalam kehidupan sosial politik Kesultanan Yogyakarta, setidaknya selama pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII, peranan rakyat dalam percaturan politik di kraton sangat kecil.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup>Hal ini agak berbeda dengan sistem yang berlaku di Kesunanan Surakarta pada masa yang sama, yaitu di bawah pemerintahan Sunan Pakubuwono X (1893-1939). Pada masa pemerintahannya, Sunan sering melakukan pendekatan pada kalangan masyarakat seperti Tirtoadisuryo, wartawan yang kemudian menjadi tokoh Sarekat Islam, serta kalangan pengusaha pribumi di Laweyan. Selain itu juga faktor kebudayaan kraton di Kesunanan Surakarta cenderung terbuka dengan penggunaan Taman Sriwedari milik Kesunanan sebagai tempat pertunjukan rakyat. Hal itu tidak terjadi di Yogyakarta selama pemerintahan Sultan HB VII. Baru kemudian di masa pemerintahan Sultan HB VIII, kesenian kraton keluar dan menjadi pertunjukan bagi umum meskipun masih sangat terbatas. Lihat Sri-Kuhn Saptodewo, *Getanzte Geschichte: Tanz, Religion und Geschichte auf Java* (Munster, 2006, LIT Verlag), halaman 147

Bab ini akan melihat, bagaimana suasana interaksi antar anggota dalam kerabat raja dan para bangsawan tinggi di kraton, dan relasi di antaranya dalam memandang masalah di dalam kraton. Juga, untuk menelusuri seberapa jauh gesekan di antara mereka menjadi celah yang dimanfaatkan pemerintah kolonial untuk intervensi, atau justru sebaliknya, mereka yang memanfaatkan intervensi Belanda untuk memperjuangkan kepentingan politiknya di dalam kraton.

### 3.1 Persoalan Status *Pangeran Adipati Anom*

Dalam struktur pemerintahan kerajaan Jawa, raja memiliki wewenang dan kebiasaan menunjuk calon pewaris tahta yang akan menggantikannya sebagai penguasa. Pewaris tahta ini merupakan putra mahkota, yang sering disebut sebagai *Pangeran Adipati Anom*. Penggunaan gelar tersebut menunjukkan bahwa dirinya adalah putra raja (pangeran) yang memiliki posisi khusus dibandingkan dengan para pangeran lainnya. Posisi khusus ini ditunjukkan dengan wewenang yang lebih luas dibandingkan saudara-saudaranya sesama putra raja, sehingga ia mendapatkan tambahan gelar *adipati*.<sup>101</sup> Arti dari kata *adipati* sendiri adalah adik raja, yang menunjukkan bahwa kekuasaannya mirip dengan raja. Tetapi untuk membedakan statusnya sebagai putra mahkota dengan para bangsawan tinggi lainnya yang juga menyandang gelar *Pangeran Adipati*, pada gelarnya ditambah dengan istilah *anom* (muda). Hal ini berarti bahwa penyandang gelar *Pangeran Adipati Anom* adalah raja muda, yang kelak akan menggantikan status penguasa sebagai calon raja.

Dalam tradisi raja-raja Jawa sejak masa dinasti Mataram Islam, penunjukan putra mahkota ini tidak selalu dilakukan oleh raja ketika menjelang akhir hayatnya, atau akhir kekuasaannya. Justru sebaliknya, untuk memperkuat posisinya, raja-raja Jawa sering menyiapkan putra mahkota pada masa puncak kekuasaannya. Setidaknya hal ini memiliki dua manfaat. Pertama, untuk mencegah terjadi intrik-intrik di kelak kemudian hari. Karena dengan penetapan

---

<sup>101</sup>Dalam struktur pemerintahan dan kekerabatan Jawa, gelar *Pangeran Adipati* dijumpai pada beberapa orang selain putra mahkota. Biasanya mereka yang memakai gelar ini adalah orang yang memiliki hubungan darah sangat dekat dengan raja, seperti saudara kandung raja atau putra sulung raja dari selir (*garwa ampilan*). Mereka sering disebut sebagai *pangeran miji* yaitu pangeran yang memiliki status dan kedudukan khusus. Lihat Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939* (Yogyakarta, 2000, Yayasan untuk Indonesia), halaman 310.

calon pewaris tahta yang sah, maka semua pihak dalam keraton bisa menerimanya. Dan setidaknya, banyak orang yang mengetahui siapa yang kelak akan memerintah di kerajaannya. Kedua, memperkuat posisi raja sendiri dan dinastinya, karena dengan keberadaan status pewaris tahta yang jelas maka dukungan kesetiaan dan kepatuhan di kalangan para pendukung putra mahkota akan dijamin.

Di Kesultanan Yogyakarta, penunjukkan putra mahkota juga dilakukan pada saat raja masih berkuasa. Bahkan tidak jarang terjadi seorang putra mahkota ditunjuk atau setidaknya dicalonkan, ketika yang bersangkutan masih kecil.<sup>102</sup> Para sultan Yogyakarta biasanya mengajukan calon putra mahkota beberapa tahun setelah dirinya memerintah, yaitu ketika dirasa bahwa stabilitas politik negaranya telah cukup mapan, terutama di lingkungan kraton. Hal ini juga terjadi pada Sultan Hamengku Buwono VII, yang tidak lama setelah memegang tampuk pemerintahan, kemudian merencanakan penunjukkan calon penggantinya sebagai putra mahkota.

Setelah berhasil memperkuat posisi kekuasaannya - baik secara intern maupun ekstern - yaitu menjamin dukungan dari para bangsawan tinggi dan melegalitaskan posisinya di mata pemerintah kolonial melalui kontrak-kontrak politik, Sultan Hamengku Buwono VII memutuskan untuk menunjuk *Pangeran Adipati Anom*. Penunjukkan ini didasarkan pada keturunan yang bersangkutan, yaitu harus dari putra raja yang dilahirkan oleh permaisuri. Mengingat Sultan Hamengku Buwono VII saat naik tahta memiliki dua orang istri, yaitu Gusti

---

<sup>102</sup>Misalnya ini terjadi pada Sultan Hamengku Buwono I yang menunjuk putra mahkota RM Sundoro, kelak Sultan Hamengku Buwono II, pada saat Sundoro masih usia remaja yaitu tahun 1771. Lihat M.C. Ricklefs, *Yogyakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792* (Singapore, 1974, Oxford Univ. Press), halaman 102. Sebaliknya Sultan Hamengku Buwono II juga menunjuk RM Surojo ketika Surojo masih muda, dan dicabut kembali untuk diganti dengan Notodiningrat. Lihat Djoko Marihandono dan Harto Juwono, *Sultan Hamengku Buwono II : Pembela dan Penegak Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta, 2007, Bayu Aji Production), halaman 99. Sultan Hamengku Buwono IV dan Sultan Hamengku Buwono V merupakan perkecualian mengingat kedua raja ini diangkat ketika masih berumur di bawah sepuluh tahun, sebagai akibat para pendahulu mereka telah wafat. Dengan demikian, kedua raja ini tidak mengalami status sebagai putra mahkota. Lihat P.W. Fillet, *De Verhouding der Vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering* ('s Gravenhage, 1895, Martinus Nijhoff), halaman 108.

Kanjeng Ratu (GKR) Kencono dan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, permaisuri pertama mendapatkan prioritas<sup>103</sup>.

Akan tetapi persoalan muncul justru bukan dari kedua permaisuri melainkan dari pihak lain. Hal ini merupakan rangkaian dari peristiwa sebelumnya yang telah ada sejak masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono V. Salah seorang putra Sultan HB V yang lahir dari permaisuri Ratu Kedaton, bernama Pangeran Suryaningalogo. Meskipun dianggap tidak memenuhi syarat untuk dijadikan seorang raja karena kelemahan fisiknya, sosok ini memiliki pengaruh yang luas terutama dari latar belakang kerabatnya dan ibunya, Ratu Kedaton.<sup>104</sup> Wanita ini adalah adik Tumenggung Sumodiningrat, putra dari KRT Sumodiningrat, panglima pasukan kraton Yogya yang terbunuh dalam peristiwa serangan tentara Inggris terhadap Kesultanan Yogyakarta tanggal 20 Juni 1812.<sup>105</sup>

Meskipun lolos dari hukuman baik oleh Sultan HB VII maupun oleh pemerintah kolonial, Ratu Kedaton tetap tidak berhenti mengupayakan putranya menjadi raja. Rencananya ini bahkan tidak didukung oleh kakaknya, Tumenggung Sumodiningrat. Namun demikian jalan lain masih terbuka baginya, ketika di dalam kraton muncul kelompok yang tidak puas terhadap keadaan yang ada. Kelompok ini berpusat pada permaisuri GKR Kencono, yang khawatir bahwa posisinya akan terdesak oleh GKR Hemas sebagai permaisuri. Alasannya, GKR

---

<sup>103</sup> Ratu Hemas sebelumnya bernama Raden Ayu Retno Purnomo, putri Raden Tumenggung Joyodipuro, yang saat itu merupakan pejabat bupati Bantul. Lihat *ANRI*, Surat Residen Yogyakarta JH Liefcrinck kepada Gubernur Jendral Idenburg tanggal 20 Mei 1913 nomor 66, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>104</sup> *ANRI, Politiek verslag der Residentie Jogjakarta over het jaar 1855*, bundel Yogya. Suryaningalogo lahir pada tanggal 17 Juni 1855, beberapa hari setelah Sultan HB V wafat. Hal ini mengakibatkan ia tidak mendapatkan peluang menjadi putra mahkota, walaupun ibunya telah diangkat menjadi permaisuri ketika ia belum lahir. Namun mengingat desas-desus bahwa ia adalah putra Sultan HB VI, adik Sultan HB V yang tidak memiliki putra, gelar dan statusnya sebagai bangsawan tinggi tetap disandanginya. Ambisi ibunya dan kemudian kerabatnya, membuat ia menjadi harapan banyak orang yang berkepentingan untuk menjadi raja. Di antara kerabatnya adalah Haji Istat dari Tembayat Klaten yang merupakan keturunan dinasti ulama Kajoran. Di antara orang-orang di Tembayat yang mungkin dipengaruhi oleh Ratu Kedaton ini pernah membentuk gerakan untuk menghancurkan kedua kerajaan Jawa dan membangun kerajaan baru dengan Suryaningalogo sebagai rajanya. Gerakan yang terjadi pada tahun 1864 ini berhasil dihancurkan oleh pemerintah tetapi baik Ratu Kedaton maupun Suryaningalogo tetap tidak ditangkap dan tinggal di kraton Yogya. Lihat Aan Kumar, "Suryengalagan Affairs", dalam *BKI*, tahun 1982, halaman 257.

<sup>105</sup> P.B.R. Carey, *Asal-Usul Perang Jawa : Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh* (Yogyakarta, 2004, LKiS), halaman 11.

Kencono hanya memiliki dua orang anak dari Sultan dan terlahir putri semua, yaitu GKR Condrokirono I dan GKR Sekar Kedaton<sup>106</sup>. Sementara itu, GKR Hemas telah melahirkan sejumlah putra, yang siap untuk dicalonkan menjadi pewaris tahta. Kekhawatiran ini semakin menjadi, ketika Sultan HB VII mulai diminta oleh pemerintah Batavia untuk mengajukan calon pewaris tahta pada bulan Maret 1881.<sup>107</sup>

Bagi Sultan HB VII, pengajuan Pangeran Suryaningalogo jelas tidak mungkin terjadi. Beberapa alasan bisa disampaikan dalam hal ini. Pertama, meskipun Sultan HB VI pada tahun 1871 mengakui, bahwa Suryaningalogo adalah putranya, namun statusnya justru menjadi sepupu Sultan HB VII, sehingga tidak mungkin mendudukkan Suryaningalogo sebagai pewaris tahta - selama masih ada putra mahkota yang lain.<sup>108</sup> Kedua, nama Suryaningalogo sudah tercemar karena dikaitkan dengan peristiwa gerakan perlawanan di Klaten pada tahun 1864, sehingga tidak mungkin bila pemerintah kolonial akan menyetujui pengangkatannya. Alasan ketiga, yaitu dengan memperhatikan pertimbangan dari Residen B. van Baak, bahwa kondisi fisik Pangeran Suryaningalogo dianggap tidak memungkinkan untuk menduduki tahta.<sup>109</sup>

Ketika mendengar berita itu, Ratu Kencono semakin mengkhawatirkan nasibnya dan putri-putrinya. Ia berharap salah satu putrinya segera menikah dan mengharapakan menantunya itu bisa menjadi sebagai pewaris tahta. Kekhawatiran dan keinginan Ratu Kencono itu diketahui oleh Ratu Kedaton, selir mending Sultan HB VI. Ratu Kedaton menawarkan agar salah satu putrinya dinikahkan dengan putranya, Pangeran Suryaningalogo, yang sedang diperjuangkan untuk menjadi pewaris tahta. Meskipun keduanya menyetujui rencana tersebut, mereka sadar, bahwa Sultan HB VII tidak akan mengabulkan permohonannya, terutama permintaan menjadi pewaris tahta. Oleh karena itu, Ratu Kedaton berupaya mempengaruhi sebanyak mungkin bangsawan di kraton agar mendukungnya.<sup>110</sup>

---

<sup>106</sup> Lihat LAMPIRAN 1.

<sup>107</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 1 Maret 1881 no. 4*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>108</sup> ANRI, *Politiek Verslag van Residentie Djokjakarta over het jaar 1872*, bundel Yogya nomer 343.

<sup>109</sup> ANRI, *Komisarial 12 Februari 1881 no. 74, geheim*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>110</sup> Aan Kumar, *op.cit.*, halaman 26. Bahkan dikatakan bahwa Ratu Kencono minta dukungan orang-orang Belanda dengan diam-diam mendatangi *Societeit*. Mungkin yang

Tindakan ini dilakukan secara diam-diam dan berlangsung hampir dua tahun. Menurut rencana mereka, perkawinan antara Pangeran Suryaningalogo dan GKR Sekar Kedaton<sup>111</sup> - putri Sultan HB VII dengan Ratu Kencono - akan dilangsungkan setelah dukungan para bangsawan dianggap cukup kuat. Kakak Ratu Kedaton, Tumenggung Sumodiningrat, ternyata menolak untuk bergabung, karena mengetahui bahwa resikonya terlalu besar. Gagal mendapat dukungan kakaknya, Ratu Kedaton mendekati bangsawan lainnya. Akan tetapi langkah politik itu terbentur masalah besar, yaitu ketika ipar Sumodiningrat, Tumenggung Gondokusumo, mengetahuinya. Gondokusumo adalah putra Patih Danurejo V, yang segera melaporkan tindakan Ratu Kedaton kepada Residen van Baak – yang akhirnya berita itu sampai juga di telinga Sultan HB VII.

Ketika mendengar berita tersebut, Residen Yogyakarta van Baak memberi nasehat kepada Sultan HB VII, agar segera menunjuk pewaris tahta sebelum gerakan ini berhasil menggalang dukungan lebih luas. Residen van Baak meminta persetujuan dari pemerintah pusat di Batavia untuk merestui langkah Sultan HB VII. Setelah menerima persetujuan Batavia, pada bulan Maret 1883, Sultan HB VII menunjuk RM Akhadiat untuk menjadi putra mahkota. Akhadiat yang saat itu baru berusia lima tahun dikukuhkan menjadi pewaris tahta pada tanggal 5 April 1883.<sup>112</sup>

Peristiwa itu menimbulkan kekecewaan Ratu Kedaton dan permaisuri Ratu Kencono. Mereka bertekad untuk melancarkan gerakan pengambilalihan kekuasaan secara paksa. Mereka dipimpin oleh putra Sumodiningrat yaitu Taruno Atmojo dan adik-adik Ratu Kedaton. Tetapi sebelum gerakan berhasil dilancarkan, pasukan Kesultanan yang dibantu oleh tentara Belanda berhasil meringkus para pemimpinnya. Hal ini mudah dilakukan berkat kepemimpinan pasukan Kesultanan Yogyakarta yang dipegang langsung oleh Tumenggung Gondokusumo. Tapi Pangeran Suryaningalogo dan Ratu Kedaton berhasil lolos

---

dimaksudkan bukan ia sendiri yang datang, karena sulit dijelaskan seorang wanita apalagi berstatus ratu memasuki kumpulan orang-orang Belanda. Diduga ada seorang utusan yang khusus dikirim olehnya untuk mendekati beberapa orang pengusaha perkebunan Belanda, yang saat itu berpengaruh pada Sultan. Mengenai hubungan antara para pengusaha perkebunan dan kerabat Kesultanan, lihat Ulbe Bosma and Remco Raben, *Being "Dutch" in the Indies: A History of Vreolisation and Empire, 1500-1920* (Singapore, 2008, NUS Press), halaman 118.

<sup>111</sup> Lihat LAMPIRAN 1.

<sup>112</sup> *Koloniaal Verslag over het jaar 1883* halaman 3.

dari penyergapan itu dan melarikan diri ke arah Magelang, dan bertahan di Desa Ngremame. Desa ini merupakan bekas tanah apanage Pangeran Wiradiningrat di zaman Mataram, leluhur Ratu Kedaton. Mereka kemudian ditangkap oleh Letnan Kohn dan Bupati Sleman Suryonegoro dan dibawa ke Yogyakarta.

Di Yogyakarta, pemeriksaan segera dilakukan sejak tanggal 15 April 1883. Dari hasil pemeriksaan itu terbukti, bahwa Ratu Kedaton adalah putra Alibasah Sentot Prawirodirjo, panglima pasukan Diponegoro. Van Baak kemudian mengusulkan untuk membuang mereka semua yang terlibat ke Manado sebagai hukumannya.<sup>113</sup> Termasuk permaisuri Sultan HB VII, Ratu Kencono.

Sultan HB VII kemudian merencanakan untuk mengeluarkan permaisurinya, Ratu Kencono - dari tahanan - agar tidak disertakan sebagai terpidana yang akan dibuang ke Manado. Agar rencananya berhasil, Sultan HB VII menyampaikan kepada Residen Yogyakarta van Baak bahwa Ratu Kencono akan diasingkan atas perintahnya, mengingat ia berstatus sebagai permaisuri. Dengan demikian, hanya pengadilan *Pradhata Agung* yang berhak menghukum Ratu Kencono, sementara Ratu Kedaton sebagai janda Sultan HB VI tidak lagi berstatus sebagai permaisuri, sehingga Sultan tidak berwenang untuk mengadilinya dengan *Pradhata Agung*.<sup>114</sup> Residen van Baak menyetujui usul itu dan menyerahkan urusan tersebut kepada Sultan HB VII. Sultan kemudian memutuskan, bahwa Ratu Kencono tidak lagi dianggap berstatus sebagai permaisuri dan harus diasingkan dari kraton (*kakebonaken*), dan sejak itu bergelar GKR Wandan<sup>115</sup>

Setelah situasi politik di kraton kembali stabil, fokus perhatian Sultan HB VII dan pemerintah kolonial ditujukan kepada RM Akhadiat yang sudah berstatus sebagai *Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro*. Karena usianya masih lima

---

<sup>113</sup>ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 18 April 1883 no. 24*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>114</sup>G.P. Rouffaer, "De Vorstenlanden", dalam John. F. Snelleman, *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië* ('s Gravenhage, 1935, Martinus Nijhoff), halaman 642.

<sup>115</sup>KPH. Mandoyokusumo, *Serat Rojo Putro Ngayogyakarta Adiningrat* (Yogyakarta, 1988, Bebadan Museum Kraton), halaman 51. Tampaknya, hukuman *kakebonaken* ini merupakan hukuman yang mana yang bersangkutan harus menyendiri dan tidak lagi memiliki hak atas semua harta dan statusnya. Bahkan kekayaan pribadinya pun juga tidak diperkenankan dibawanya. Hal ini terbukti dari permohonan GKR Wandan kepada Residen JM. van Vleuten, pengganti van Baak, agar harta perhiasan pribadinya berhak diterimanya kembali. Lihat ANRI, Agenda nomor 40 tahun 1889, bundel *Algemeen Secretarie*.

tahun, ia belum bisa diminta untuk menandatangani kontrak politik. Dengan demikian, disepakati, bahwa pemerintah Belanda akan menunggu sampai Akhadiat dewasa, sehingga bisa mengerti dan bertanggung jawab untuk menandatangani kontrak politik sebagai kewajiban seorang putra mahkota. Sementara itu, menyangkut penetapan Akhadiat sebagai putra mahkota, semestinya tidak ada penolakan dari selir atau kerabat raja lainnya. Ia adalah putra sulung dari permaisuri Ratu Hemas - putra KRT Joyodipuro. Setelah Ratu Kencono tersingkir, posisi Ratu Hemas sebagai satu-satunya permaisuri menjadi aman, karena tidak ada saingan.

Namun ketenangan Ratu Hemas tidak berlangsung lama. Karena kemudian, Sultan HB VII mengangkat seorang permaisuri lagi untuk menjadi pengganti, apabila Ratu Hemas tiba-tiba meninggal dunia. Ia mengangkat salah seorang selirnya, Raden Ayu Retno Sriwulan, yang kemudian diberi gelar permaisuri GKR Kencono, menggantikan posisi GKR Kencono lama (*sepuh*) yang telah disingkirkan. Ratu Kencono (muda) ini adalah putra Bendoro Raden Mas Haryo (BRMH) Hadinegoro, cucu Sultan HB II. Sejak Ratu Kencono muda ini masih berstatus sebagai selir, Sultan mendapatkan sejumlah putra yang berstatus pangeran. Putra yang tertua adalah Pangeran Haryo Mangkukusumo.

Persoalan baru muncul ketika pada bulan Oktober 1895, tiba-tiba Akhadiat meninggal. Karena usianya yang masih sekitar 17 tahun dan belum menikah, ia mendapatkan sebutan *Pangeran Adipati Anom Seda Jaka*, yaitu wafat ketika masih berstatus perjaka.<sup>116</sup> Peristiwa putra mahkota wafat ini kemudian menimbulkan pergolakan di kalangan elit penguasa Kesultanan Yogyakarta. Kini Ratu Kencono muda tampil untuk menuntut haknya sebagai permaisuri kedua. Ia menuntut, agar putranya - Pangeran Mangkukusumo - diangkat sebagai pengganti Akhadiat. Alasannya, usia Mangkukusumo lebih tua daripada Akhadiat

---

<sup>116</sup>Ada desas-desus di kraton yang mengatakan bahwa penyebab Akhadiat meninggal adalah karena diracun atau direkayasa oleh pihak Belanda yang tidak menghendaknya sebagai putra mahkota. Tampaknya, desas-desus ini tidak memiliki dasar yang kuat, karena bagi Belanda, Akhadiat belum bisa dipastikan arahnya mengingat usianya masih muda. Dengan demikian, belum ada persiapan bagi konflik dengan tuntutan pemerintah. Di samping itu, Belanda tidak melihat ada calon lain yang lebih layak untuk diajukan menjadi putra mahkota. Justru kecurigaan perlu diarahkan pada para pengikut Suryaningalogo yang melakukan pembalasan terhadap penindasan perlawanannya, atau pengikut GKR Wandan yang merasa sakit hati atas pemasygulannya.



- meskipun ketika Akhadiat diangkat sebagai putra mahkota, Mangkukusumo masih berstatus sebagai putra dari selir.

Namun Sultan HB VII tidak mengabulkan permintaan itu. Pertimbangannya adalah bahwa Ratu Kencono tetap berstatus sebagai permaisuri kedua, dan baru bisa tampil berperan apabila Ratu Hemas tidak ada lagi, atau tidak lagi berfungsi sebagai permaisuri pertama. Atas dasar tersebut, Sultan HB VII tetap menunjuk putranya dari Ratu Hemas untuk menjadi pewaris tahta. Ia adalah adik Akhadiat, yaitu RM Juminah. Keputusan pengangkatan Juminah ini juga disetujui oleh Residen Belanda CM. Ketting Olivier, yang kemudian menyampaikannya kepada Gubernur Jenderal.

Setelah menerima persetujuan dari pemerintah pusat di Batavia, CM. Ketting Olivier memperkenalkan Sultan HB VII untuk mengukuhkan status Juminah sebagai putra mahkota dengan gelar *Pangeran Adipati Anom*. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Jumadilawal tahun Wawu 1825 atau 11 November 1895, yang digambarkan dalam sebuah tembang Jawa :

*Manising kang kinarya mengeti, tatkalanya karsa dalem Nata  
Ingkang Sinuhun Sultan, kang jumeneng ping pitu,  
Angrenggani Yogyakarta di, arsa anjunjung putra,  
Dadya raja sunu, ing reh kang raka mardika, kang wus  
Pinaringan asma Kanjeng Gusti Adipati Juminah<sup>117</sup>*

Sungguh indah ketika mengingat, pada saat Paduka Raja  
Yang Mulia Sultan, yang berkuasa ke tujuh  
Menduduki tahta di Yogyakarta, berkenan mengangkat putranya  
Menjadi putra mahkota, menggantikan kakandanya,  
Dan telah mendapatkan nama Kanjeng Gusti Adipati Juminah

---

<sup>117</sup>*Serat Pranatan ing Ngayogya, sekar Dandanggendis pupuh I. Tanggal pengukuhanannya dicantumkan dalam sengkala : tata panembahipun amengeti Sri Narapati, yang menunjuk tahun 1825 Hijriah.*

Akan tetapi berbeda dengan Akhadiat yang dilantik ketika masih berumur lima tahun, Juminah sudah menginjak usia remaja, sehingga baginya layak untuk mendapatkan gelar lengkap, yaitu *Pangeran Adipati Anom Hamangkunagoro*.

Setelah mendapatkan status demikian, putra mahkota Juminah mendapatkan kehormatan sesuai tradisi untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas mengenai statusnya. Hal ini terjadi lima hari setelah pengukuhannya, yaitu pada tanggal 16 November 1895. Prosesi ini diramaikan dengan arak-arakan yang meriah, dan putra mahkota Pangeran Juminah tampak duduk berdampingan dengan ayahandanya, Sultan Hamengku Buwono VII, dalam kereta kencana mengelilingi kraton. Hal yang penting untuk dilihat di sini adalah bahwa Juminah sudah diperkenankan untuk menyambut para pejabat Belanda yang datang di kraton (*Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunegoro anyaos i kurmat tabeyan dating Kanjeng tuwan Residen, lajeng Derek lumebet gandengan*). Ketika duduk di kursi yang disediakan, posisinya mirip dengan Sultan, hanya letak duduk Pangeran Juminah masih berada di sebelah kiri residen (*Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom wonten kiwanipun Kanjeng Tuwan Residen*).<sup>118</sup>

### 3.2 Penggantian Juminah dan Kematian RM Putro

Setelah pelantikan GRM Juminah menjadi putra mahkota di Kesultanan Yogyakarta, pemerintahan Gubernur Jenderal CHA. van Wijck mulai memikirkan rencana untuk menyodori kontrak politik kepada Juminah. Kontrak ini disebut sebagai *Kroonprins Verklaring* atau pernyataan politik oleh putra mahkota, seperti yang terjadi di Kesunanan Surakarta pada 25 Maret 1893 yang menandai prosesi penetapan RM Gusti Sayidin Malikuk Kusno sebagai putra mahkota Kesunanan Surakarta.

Namun rencana penandatanganan *verklaring* di Kesultanan tidak berlangsung lancar. Pasal-pasal yang disodorkan untuk ditandatangani oleh Pangeran Juminah berbeda dengan apa yang ditandatangani oleh RM Gusti Sayidin Malikuk Kusno di Kesunanan Surakarta. Setidaknya ada lima pasal yang dimuat dalam *Verklaring* itu yaitu (1) pemberian hak bangun (*opstalrecht*) kepada

---

<sup>118</sup>*Serat Pranatan ing Ngayogya, pupuh 35.*

pemerintah kolonial<sup>119</sup>, kemudian juga (2) pengambilalihan hak dari penguasa pribumi bagi monopoli penjualan garam, dan (3) candu di wilayah Kesultanan dengan kompensasi tahunan, (4) ketentuan yang lebih longgar mengenai sewa-menyewa tanah bagi kepentingan perkebunan (*onderneming*), dan yang terakhir menyangkut tentang (5) kesanggupan pewaris tahta untuk tidak memungut pajak baru - apabila ia memegang kekuasaan.

Kelima pasal ini menjadi dasar bagi dominasi politik dan ekonomi pemerintah Belanda, karena dengan demikian Kesultanan Yogyakarta akan menerima kompensasi tahunan tanpa adanya wewenang mengontrol dan menjalankan semua ketentuan yang diberlakukan di wilayahnya. Salah satu pasal yang sering menjadi persoalan adalah hak bangun (*opstalrecht*). Dengan pemberian hak bangun kepada pemerintah, ini berarti tanah yang digunakan untuk mendirikan bangunan itu harus diubah statusnya. Pemerintah kolonial tidak mungkin menyewa tanah tersebut seperti hal yang terjadi dengan perusahaan perkebunan (*onderneming*). Sebaliknya, pemerintah harus mendapatkan hak milik mutlak (*eigendom*), karena dengan hak bangun yang dimiliki, pemerintah kolonial tidak hanya membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingannya semata, tetapi juga membangun fasilitas yang akan digunakan bagi kepentingan warganya - terutama bagi orang Belanda di Yogyakarta.

Bertolak dari situ, persoalan berkembang ke dua arah. Pertama, keberadaan kompleks infrastruktur perkantoran milik pemerintah - seperti kantor pos, tangsi militer (yang selama ini masih terpusat pada benteng), kantor residen, dan kantor-kantor lain - berada pada posisi strategis dalam tata ruang pusat kota Kesultanan (*kuthogoro*). Hal ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan perubahan dan ketidakseimbangan dalam tata ruang yang dibangun berdasarkan konsep kosmologi Jawa.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup>Pemerintah menuntut hak bangun seperti yang telah diberikan kepada para pengusaha swasta yang menyewa tanah di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1884. Namun mengingat pemberian hak bangun ini dimuat dalam *Staatsblad van Nederlandsch Indie* nomor 9, berarti pemerintah kolonial menekan Sultan agar memberikan hak bangun kepada para penyewa tanah. Dengan demikian, sebenarnya yang memberikan hak tersebut adalah pemerintah kolonial, dan kini pemerintah ingin meminta hak bangun bagi proyek-proyek negara kepada Sultan melalui putra mahkota.

<sup>120</sup>Dalam tata ruang *kuthorojo* atau *kuthogoro* sebagai pusat kekuasaan raja Jawa, semua bangunan telah diatur menurut tatanan dengan kraton sebagai sentralnya. Pembangunan yang tidak sesuai dengan tatanan seperti arah kiblat sakral Merapi-Laut Selatan, akan merusak keseimbangan

Faktor kedua yang menjadi persoalan dari pemberian hak bangun tersebut adalah rencana penjualan tanah kepada orang-orang Eropa yang akan membentuk suatu kompleks pemukiman tersendiri, yang dikenal sebagai *Europeesch Wijk* (kampong Eropa). Hal ini merupakan suatu lokasi tempat tinggal khusus untuk orang-orang Eropa dan tidak bisa dimasuki atau dihuni oleh orang lain, baik orang Timur Asing maupun pribumi. Pembukaan kampung ini akan menandai pemberlakuan hukum pemerintah (*concordantie*) di bagian dari *kuthogoro*, sesuatu yang dalam pandangan kosmologis kekuasaan raja-raja Jawa akan dianggap sebagai ancaman terhadap wibawa raja yang berkuasa mutlak (*baudenda hanyakrawati*).<sup>121</sup>

Kedua faktor akan menimbulkan akibat langsung yaitu pengalihan hak milik dan kewenangan atas tanah (*eigendom recht* dan *beschikingsrecht*) dari raja Jawa kepada orang asing, dalam hal ini pemerintah kolonial. Raja tidak lagi bisa memiliki kewenangan apapun atas tanah-tanah yang sudah dibangun dengan kompleks perumahan model Barat dan tidak berwenang atas orang-orang yang tinggal di atasnya. Hal ini bukan hanya mengurangi kewenangan raja atas tanahnya, tetapi juga atas penghuninya, dan hal itu tidak akan mungkin bisa dalam konteks kekuasaan Jawa.<sup>122</sup>

Dengan melihat isi dari pasal-pasal perjanjian tersebut, Pangeran Adipati Juminah merasa keberatan dan menolaknya. Alasan itu disampaikan langsung kepada Sultan HB VII, yang kemudian memberitahukan hal ini kepada Residen Ketting Olivier. Namun Residen Yogyakarta itu tidak berani memaksakan tuntutan tersebut agar segera ditandatangani oleh Juminah. Persoalan ini menjadi

---

kosmologi menurut konsep mistis tata ruang kerajaan Jawa. Hal ini akan menimbulkan kelabilan dan berdampak pada kemerosotan wibawa kraton. Lihat tentang ini Ronald Gilbert Gill, *De Stadt Morphologie op Java en Madoera* (Disertasi Universitas Delft, tahun 1985)

<sup>121</sup>Kehadiran unsur asing yang tidak termasuk dalam lingkup kosmologi kekuasaan Jawa dan sebaliknya tidak menunjukkan kepatuhan pada kekuasaan pusat ini dianggap mengganggu keselarasan dalam konteks makrokosmos-mikrokosmos. Lihat tentang konsep ini dalam Andreas Yumarna, *Unity and Diversity: a Philosophical and Ethical Study of the Javanese concept of Keselarasan* (Roma, 1996, Pontificia Universitas Gregoriana), halaman 108.

<sup>122</sup>Anon, *Javaansche Adatrecht* (Leiden, 1923, J.E. Brill), halaman 119. Dalam konteks kepemilikan Jawa, semua tanah adalah milik raja (*Vorstendomein*) dan rakyat hanya berhak memiliki hak garap, dengan kewajiban menyetorkan sebagian besar hasilnya kepada raja lewat pejabat pemungut yang ditunjuk. Terutama tanah-tanah yang terletak di lingkaran kekuasaan seperti *kuthogoro* dan *negara agung* menjadi wewenang mutlak dari raja, sebab di sana terletak tanah-tanah apanage para bangsawan. Lihat Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX* (Jakarta, 1985, Yayasan Obor Indonesia), halaman 118-119.

mengambang dan terkatung-katung seperti soal tuntutan pemerintah kolonial di Batavia tentang pengambilan wewenang proses peradilan pidana dari Sultan kepada pemerintah Hindia Belanda. Sebagai akibatnya, perjanjian soal masalah peradilan itu tidak bisa terlaksana sampai akhir abad XIX.

Akan tetapi situasi ini berubah pada akhir pergantian abad, ketika baik Gubernur Jenderal Hindia Belanda maupun Residen Yogyakarta mengalami pergantian. Pada tahun 1899, van der Wyck digantikan oleh W. Rooseboom sementara Ketting Olivier digantikan oleh JA. Ament tiga tahun sebelumnya.<sup>123</sup> Kedua pejabat ini mencoba kembali menyodorkan kontrak politik (*verklaring*) bagi putra mahkota, Pangeran Juminah. Instruksi Rooseboom berisi desakan, agar *verklaring* tersebut segera ditandatangani sebelum peralihan abad, karena pemerintah memiliki rencana baru sehubungan dengan persewaan tanah.<sup>124</sup>

Sikap Juminah yang masih tetap berkeras tidak bersedia menandatangani *verklaring* menjadi ganjalan hubungan antara pemerintah kolonial dan Kesultanan Yogyakarta. Sementara itu, Residen Ament yang melakukan pendekatan lewat Sultan HB VII dan dibantu oleh Patih Danurejo VI tidak mampu mengubah sikap Juminah. Sultan HB VII sendiri bersikap tidak bersedia ikut campur terhadap persoalan itu, meskipun sikap Sultan ini cukup menimbulkan kecurigaan Ament dan para petinggi Belanda di pusat tentang ada maksud lain di balik itu.

---

<sup>123</sup>Willem Rooseboom adalah purnawirawan jenderal. Dengan jiwa militernya dan bersamaan dengan meredanya peperangan di Aceh, Rooseboom bermaksud memaksakan kekuasaan Belanda secara lebih intensif terhadap raja-raja pribumi. Kekuasaannya berlangsung seiring dengan peran militer yang menguat dalam pemerintahan Hindia Belanda. Lihat tentang ini H.W. van den Doel, "Military Rule in the Netherlands Indies" dalam Robert Cribb, *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden, 1994, KITLV Leiden), halaman 64-65. Ament sebelumnya adalah asisten residen Mojokerto. Ia adalah seorang pejabat yang sangat dekat hubungannya dengan para pengusaha industri gula. Dengan demikian, penempatannya sebagai residen Yogya dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk memperluas dan memudahkan persewaan tanah oleh pabrik-pabrik gula. Lihat Sri Margana, "Hybridity, Colonial Capitalism and Indigenious Resistance: the Case of Paku Alam in Central Java", dalam Ule Bosma, Juan Gusti Cordero and G. Roger Knight, *Sugarlandia revisited: Sugar and Colonialism in Asia and the Americas, 1800 to 1940* (Oxford, 2007, Brehgan Books), halaman 111.

<sup>124</sup>Persewaan tanah menjadi bagian dari program kebijakan pemerintah terhadap *Vorstenlanden*. Namun demikian, hal itu menjadi persoalan yang dominan. Hal ini disebabkan oleh lobby kuat yang dilakukan oleh para pengusaha gula di Parlemen Belanda pada akhir abad XIX, yang memberikan masukan besar bagi kas negara di Eropa. Lihat Joost Cote, "A Teaspoon of Sugar...?": *Assesing the Sugar Content in Colonial Discourse in the Dutch Indies, 1880 to 1914*", dalam Ule Bosma, 2007, *ibid.*, halaman 115.

Kecurigaan yang muncul di antara para pejabat Belanda, terutama Residen Ament terhadap Juminah - dan akhirnya juga berpengaruh terhadap pendangannya kepada Sultan HB VII - adalah kesukaan putra mahkota itu berkunjung ke tempat-tempat tertentu untuk melakukan meditasi. Di antara lokasi yang dikunjunginya adalah makam raja-raja di Imogiri, terutama kompleks makam *kaswargan*, Kesultanan Yogyakarta. Dalam kompleks itu dimakamkan para raja Yogya sebelumnya - termasuk Pangeran Mangkubumi atau Sultan HB I yang sangat dihormati.<sup>125</sup>

Selain ke kompleks Makam Imogiri, Juminah juga sering diketahui berada di tempat pertapaan Pantai Selatan, yaitu di Mantingan. Lokasi ini merupakan tempat meditasi raja-raja Jawa ketika diduga ingin berhubungan dengan penguasa magis di laut Selatan, yaitu Ratu Kidul. Kunjungannya ke Mantingan berbeda dengan Makam Imogiri, yaitu tidak disertai oleh para pengawal dan seringkali tidak kembali ke kraton selama beberapa hari.<sup>126</sup>

Dua hal yang bisa dijadikan alasan bagi Ament untuk mencurigai dan mempersoalkan hal ini. Pertama, kunjungan Pangeran Juminah ke makam raja-raja. Tindakan tersebut sejak dahulu dianggap sebagai sesuatu yang tabu, baik bagi raja yang masih berkuasa, maupun calon pewaris tahta. Bahkan dalam tradisi Jawa yang tak tertulis, ada pantangan bagi raja yang berkuasa dan putra mahkota melewati pintu gerbang *Gading*, yang digunakan sebagai jalur pemberangkatan jenazah raja-raja Yogyakarta menuju kompleks Makam Imogiri. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Pangeran Juminah bisa

---

<sup>125</sup>Sultan Hamengku Buwono I mendapatkan gelar *Sultan Swarga* dari Kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, kompleks makamnya disebut *Kaswargan*. Hal ini menunjukkan penghormatan yang besar dari kawula Yogyakarta terhadap raja pertamanya. Di samping itu, sosok Sultan HB I juga dianggap sebagai simbol penentangan terhadap pemerintah kolonial, selain Diponegoro. Lihat M.C. Ricklefs, "A Note on Professor Johns's 'Gift Addressed to the Spirit of the Prophet'", dalam *BKI*, tahun 1973, jilid 129, halaman 347. Di situ disebutkan kutipan berikut ini: *Raden Ayu Danukusuma, putra Kanjeng Sinuwun Swarga*. Di samping itu gelar *swarga* juga diberikan kepada Sultan HB I, karena karyanya *bangsal kaswargan* di kompleks Kraton Yogyakarta.

<sup>126</sup>Mitos tentang penguasa laut selatan ini sebenarnya lebih merupakan simbolis, yaitu untuk legitimasi raja-raja Jawa. Perkawinan antara raja-raja Jawa dan Ratu Laut Selatan tidak bisa ditafsirkan secara fisik, tetapi harus dianalisa sebagai suatu mitologi. Hal ini lebih menunjukkan legitimasi raja sebagai penguasa darat dan air, sesuai dengan konsep *salumahing bumi sakurebing langit*. Lihat Purwadi, *Nyai Loro Kidul dan Legitimasi Politik Jawa* (Yogyakarta, 2006, Media Abadi), halaman 196.

dikategorikan sebagai suatu tindakan yang telah melanggar pedoman tradisi Jawa (*paugeran*) dan tidak pantas dilakukan oleh seorang pewaris tahta.<sup>127</sup>

Hal kedua yang menimbulkan kecurigaan bagi Ament adalah kunjungan Juminah ke Mantingan. Tempat ini dianggap sebagai lokasi yang disinyalasi menjadi sarana untuk menyusun kekuatan bagi tujuan mengadakan gerakan perlawanan. Pangeran Diponegoro sebelum memulai perlawanannya terhadap pemerintah kolonial pada bulan Juli 1825 telah bermeditasi di tempat ini.<sup>128</sup> Demikian pula dengan Sunan Pakubuwono VI yang diam-diam meninggalkan kraton pada bulan Juni 1830, dan ternyata ditemukan sedang bermeditasi di Mantingan. Akibatnya, Sunan PB VI mendapat hukuman pemerintah kolonial berupa pengasingan ke Ambon hingga wafat.<sup>129</sup>

Sebagai akibatnya, pada tahun 1902, Residen Ament menuntut kepada Sultan HB VII, agar Pangeran Juminah diturunkan statusnya sebagai pewaris tahta dan harus digantikan oleh orang lain. Sementara itu, Juminah wajib diperiksa dan apabila diketahui telah melakukan kesalahan dan pelanggaran, harus dijatuhi hukuman pembuangan seperti halnya yang diterima oleh Pangeran Suryaningalogo.

Menanggapi tekanan Ament, Sultan HB VII merasa keberatan. Jika desakan itu dilaksanakan, berarti selama pemerintahannya telah dua kali terjadi pergantian putra mahkota. Meskipun pergantian putra mahkota merupakan hal yang memungkinkan, Sultan HB VII merasa bahwa Juminah tidak melakukan pelanggaran yang berarti, dan yakin bahwa persoalan yang sebenarnya adalah masalah *verklaring*. Namun, menolak tuntutan Ament bisa dituduh menentang

---

<sup>127</sup>Sejumlah narasumber di Yogyakarta menyebutkan bahwa aktivitas tersebut mirip dan mungkin diwarisi (*nunggak semi*) dari leluhurnya yang juga bernama Pangeran Juminah, seorang bangsawan yang menjadi panglima Mataram semasa pemerintahan Sultan Agung, tetapi sekaligus menjadi penasehat raja tentang Islam dan spiritual. Lihat Fredy Heryanto, *Mengenal Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat* (Yogyakarta, 2003, Warna Grafika), halaman 78.

<sup>128</sup>Paschalis Maria Laksono dan E.G. Koentjoro, *Tradition in Javanese Social Structure: kingdom and countryside* (Yogyakarta, 1987, Gadjahmada Univ. Press.), halaman 56. Selain Mantingan, Diponegoro juga sering berkunjung ke goa-goa lain di sepanjang pantai selatan Yogyakarta.

<sup>129</sup>Tindakan ini merupakan cermin kekecewaan Pakubuwono VI atas aneksasi wilayah *monconegoro* oleh Belanda setelah berakhirnya Perang Diponegoro. Meninggalkan kraton tanpa seizin residen. dianggap pelanggaran terhadap kontrak, sehingga Residen Nahuys berhak menangkapnya. Ia dibuang ke Ambon dan meninggal di sana pada tahun 1849 dengan gelar *Sunan Banguntopo*. Lihat Anon, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Jakarta, 1990, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah), halaman 115.

kebijakan pemerintah Hindia Belanda, dan hal tersebut akan beresiko besar, bukan hanya bagi Juminah dan dirinya, tetapi juga bagi Kesultanan Yogyakarta.

Akhirnya Sultan HB VII menawarkan suatu solusi kepada Ament, bahwa status Juminah bakal dicopot dari posisi putra mahkota, namun untuk menghukum tindakan Juminah akan diadili dengan *Pradata Agung*. Alasan Sultan HB VII, bila Juminah dinyatakan bersalah, maka ia dipersalahkan karena melanggar aturan-aturan tradisi (*paugeran*), dan bukan melanggar kontrak politik yang dibuat oleh Sultan HB VII, ataupun peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pertimbangan dasarnya adalah bahwa dalam kedua ketentuan ini tidak ada yang mengatur tentang kerabat raja, melainkan hanya menyangkut raja. Juminah juga tidak berurusan dengan kawula pemerintah secara individu, ataupun dengan pemerintah kolonial. Alasan lainnya adalah bahwa peradilan terhadap kerabat raja masih menjadi wewenang raja. Dengan demikian, keputusan tertinggi untuk menjatuhkan hukuman terhadap Pangeran Juminah masih terletak pada *Pradata Agung* di kraton.<sup>130</sup>

Ketika mendengar pernyataan Sultan HB VII tersebut, Ament menyetujuinya. Hal yang paling penting baginya adalah status putra mahkota tidak lagi disandang oleh Juminah, dan harus digantikan oleh yang lain untuk menghindari kemacetan pengesahan *verklaring*. Meskipun demikian, sebelum Ament diganti oleh JM. Couperus pada bulan Mei 1902, ia ingin mengetahui bagaimana hukuman yang akan dijatuhkan kepada Juminah. Sultan HB VII mengupayakan agar apapun hukuman yang dijatuhkan, jangan mengakibatkan pengasingan Juminah dari Yogyakarta. Akhirnya *Pradata Agung* menetapkan, bahwa Juminah dianggap memiliki kelainan jiwa, karena sering memiliki hubungan dengan alam gaib. Dengan demikian, ia tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang pewaris tahta dan juga tidak dapat dikenai tindakan hukuman.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup>Kraton Yogya, *Kraton Jogya: the History and cultural heritage* (Yogyakarta, 2002, Indonesia Marketing Association), halaman 113. Pengadilan ini sering juga disebut sebagai *Pradata Darah Dalem Kraton Ngayogyakarta*.

<sup>131</sup> Attas Hendartini Habsyah, Mooriatu Sudiharto, Putut Husono, *Perjalanan Panjang Anak Bumi* (Jakarta, 2008, Yayasan Obor Indonesia), halaman 168. Keputusan itu sering disebut sebagai *diedanke* atau dianggap gila. Hal serupa juga pernah melanda saudara Juminah, yaitu Pangeran Soerjomataram yang karena dicurigai menggalang masa lewat jalur gerakan kebatinan, diasingkan dari Yogyakarta selama dua puluh tahun oleh Belanda. Namun atas permintaan Sultan HB VII, Surjomataram dikembalikan karena dianggap orang gila (*tiyang ewah*). Setelah kembali ke Yogya, ia memiliki padepokan dan tinggal di kompleks kraton dengan bergelar Ki Ageng



Setelah Pangeran Juminah turun, jabatan sebagai putra mahkota kembali kosong. Untuk itu, Sultan HB VII mengajukan calon kepada pemerintah agar segera bisa mengisi kekosongan tersebut. Mengingat Couperus adalah pejabat baru, ia belum banyak mempelajari apa yang terjadi di Yogyakarta, kecuali dari laporan yang ditinggalkan oleh Müllemeister.<sup>132</sup> Hal ini membuat Sultan HB VII lebih mudah menyesuaikan diri dengan tuntutan pemerintah kolonial dan kondisi yang ada di Kesultanan Yogyakarta. Pada prinsipnya, Sultan HB VII mencoba untuk menunda pembuatan *verklaring*, karena dua alasan. Pertama, isi *verklaring* sangat mengurangi kekuatan ekonomi Kesultanan Yogyakarta. Dan kedua, karena Sultan sendiri disibukkan dengan tuntutan Belanda bagi perombakan peradilan dan reorganisasi agraria.

Kesempatan yang ditunggu pemerintah kolonial muncul ketika Sultan HB VII menunjuk pengganti putra mahkota, yang jatuh pada Raden Mas (RM) Putro, adik kandung Juminah. Ketika Putro ditunjuk sebagai putra mahkota pada akhir 1902, usianya juga belum genap dewasa, mengingat antara Juminah dan dirinya masih terdapat seorang kakak perempuan. Bahkan ia masih belum memiliki istri, dan baru menikah pada tahun 1907.<sup>133</sup> Dengan demikian Putro belum bisa diminta oleh Couperus untuk menandatangani *verklaring*. Namun Couperus tidak mengajukan keberatan, karena ia yakin bahwa RM Putro akan bisa dibujuk untuk mengikuti permintaannya, terutama berkaitan dengan isi *Verklaring*.<sup>134</sup> Untuk itu, Couperus mendorong Sultan HB VII, agar sejak awal melibatkan RM Putro dalam urusan kenegaraan, sehingga kelak akan mendapatkan wawasan dan lebih siap untuk memerintah. Sultan HB VII

---

Suryomataram. Lihat Soeyanto, *Cokrojiyo: Hasil Karya dan Pengabdiannya* (Jakarta, 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), halaman 94.

<sup>132</sup>ANRI, *Memorie van Overgave Resident R. Couperus 1909*, reel no. 4, seri MvO DL, halaman 2. Ament sendiri tidak meninggalkan laporan kepadanya, dan satu-satunya informasi yang diterimanya adalah dari Müllemeister yang pergi tahun 1891. Tentu saja kondisi selama sepuluh tahun telah mengalami perubahan. Tidak dijelaskan mengapa Ament tidak membuat laporan pertanggungjawaban.

<sup>133</sup>R.Ng. Citrasantana, *Serat Sejarah ing Ngayogyakarta tuwin Mangkuengaran* (Yogyakarta, 1926, Kraton Yogya).

<sup>134</sup>ANRI, *MvO Couperus, ibid.*, halaman 26. Menurut penilaian Couperus, Putro tidak begitu pandai, tetapi mau belajar dengan mendengar pembicaraan tentang politik dan persoalan lain yang berkaitan dengan kraton. Ia yakin, apabila Putro terus didampingi olehnya, masalah tuntutan pemerintah tidak akan terjadi.

menanggapi positif permintaan Couperus, dan dalam sejumlah kunjungan ke daerah, RM Putro diajak mendampinginya.<sup>135</sup>

Hubungan harmonis ini mulai berubah lagi, ketika Couperus digantikan oleh PH. van Andel pada bulan Maret 1908. Berbeda dengan Couperus, van Andel bukan orang lama di Yogyakarta. Sejak dua tahun sebelumnya, Andel telah menjabat sebagai asisten residen *Afdeeling* Mataram dan membantu Couperus dalam menjalankan tugas-tugasnya - terutama dalam hubungannya dengan Kesultanan Yogyakarta. Hal ini membuat Andel mampu mengatur strategi untuk menghadapi sikap dan karakter pemerintahan Sultan HB VII.

Tugas utama yang harus diselesaikan oleh Van Andel adalah menuntaskan masalah *verklaring* yang telah terkatung-katung sejak tiga decade, dan mencegah pengaruh organisasi politik yang mulai marak di Yogyakarta - terutama agar tidak berkembang di kalangan elit penguasa di kraton.<sup>136</sup> Akan tetapi tuntutan Batavia mengenai langkah-langkah pembaharuan di *Vorstenlanden*, yaitu reorganisasi agraria dan peradilan, tidak lagi bisa dibendung. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah mengeluarkan rencana peraturan sewa tanah yang baru bagi wilayah ini pada tahun 1911, sehingga van Andel diperintahkan untuk menyelesaikannya sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.

Setelah mengadakan pembicaraan panjang dengan Sultan HB VII, pada tanggal 1 November 1909 Van Andel mencapai kesepakatan tentang pembaharuan agraria. Sistem apanage akan dihilangkan dan kemudian akan dibentuk kas kraton yang menampung semua ganti rugi atau penghasilan yang diperoleh dari eksploitasi tanah-tanah tersebut. Kas kraton akan menjadi wewenang Sultan, tetapi di bawah kontrol residen dan penggunaan serta pengeluarannya harus dilakukan atas sepengetahuan dan seizin residen. Salah satu penggunaan kas kraton adalah untuk menggaji para pegawai yang terdiri atas bekas *patuh*.

---

<sup>135</sup>Di antaranya adalah kunjungan ke Kulon Progo, yang sejak tahun 1830 menjadi sumber persoalan tanah kraton di sana. Kunjungan ini terjadi pada tahun 1905. Lihat *Cathetan kawontenanipun miyos dalem Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Dhumateng Pengasih*, koleksi Radya Pustaka Surakarta nomor SMP 117/15.

<sup>136</sup>Akira Nagazumi, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia : Budi Utomo* (Jakarta, 1989, Grafiti Pers.), halaman 105. Pada awal pemerintahannya, Andel memperingatkan kekhawatiran ini kepada Gubernur Jenderal JB. van Heutsz, bahwa Budi Utomo akan mudah mendapatkan pengaruh di kalangan bangsawan Jawa, karena para pengurus organisasi ini memiliki latar belakang feodal dan birokrat; dua status yang dekat dan memiliki akses dengan kraton Yogyakarta.

Mengingat sistem kepemilikan apanage hilang, maka kerja wajib juga dihapuskan - termasuk yang dipungut oleh para penyewa tanah.<sup>137</sup>

Ketika kondisi di atas telah menjadi jalan utama menuju reorganisasi agraria, persoalan *verklaring* kembali muncul. Masalah ini terutama berkaitan dengan eksploitasi garam di wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan persoalan hak bangun (*opstalrecht*). RM Putro yang, meskipun sudah bergelar Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, tetap tidak bisa berbuat banyak. Akibatnya, pembicaraan kemudian diambil alih oleh Sultan HB VII. Akan tetapi dalam perundingan yang berlangsung sepanjang tahun 1910, Sultan HB VII menyatakan bahwa dirinya hanya bersedia membicarakan masalah garam dan candu, apabila persoalan ganti rugi dari penghapusan sistem apanage sudah berhasil diwujudkan. Dengan demikian, persoalan pembaruan *Verklaring* tertunda kembali.

Sementara itu, RM Putro sudah mulai beranjak dewasa dan diperkenankan oleh Sultan HB VII meninggalkan kraton dan pindah menuju kediaman khusus untuk putra mahkota (*Dalem Kadipaten*). Di tempat ini, RM Putro sebagai Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro dibantu oleh seorang pejabat yang berstatus sebagai *patih* untuk mengurusinya selaku putra mahkota. Sultan HB VII juga mempercayakan kepada RM Putro tentang persoalan yang berkaitan dengan rumah tangga kraton. Dengan demikian, rumah kediamannya di *Kadipaten* lebih banyak berfungsi sebagai kantor administrasi kraton, dan putra mahkota menjalankan tugas sebagai *patih jero*, seperti pada masa Kerajaan Mataram.

Memasuki tahun 1911, para pejabat Belanda memiliki harapan bahwa persoalan *verklaring* akan selesai, karena pada tahun itu pula sebuah peraturan sewa tanah yang baru akan diumumkan. Harapan itu tiba-tiba kembali memudar ketika diketahui bahwa RM Putro sering sakit dan kesehatannya terus menurun. Situasi ini semula tidak diketahui oleh pemerintah kolonial, karena Sultan HB VII tidak mengungkapkan secara gamblang kepada van Andel. Ketika itu, Sultan

---

<sup>137</sup>C.Ch. van den Haspel, 1985, *op.cit.*, halaman 191.

HB VII lebih banyak memusatkan perhatian dan waktunya untuk mempersiapkan pernikahan putrinya dengan Sunan Paku Buwono X dari Surakarta.<sup>138</sup>

Kondisi kesehatan Putro yang semakin merosot ini baru diketahui oleh pemerintah Hindia Belanda pada pertengahan tahun 1912. Sejak mendengar kabar tersebut, Residen Yogyakarta JH. Lieftrinck, pengganti van Andel, mengupayakan pengobatan medis. Namun, upaya pengobatan itu tidak membawa hasil, dan akhirnya pada tanggal 20 Pebruari 1913, RM Putro wafat.<sup>139</sup> Atas kejadian itu, Gubernur Jenderal Idenburg kemudian memerintahkan Lieftrinck untuk menemui Sultan HB VII di kraton, dengan tujuan agar semua hak dan wewenang putra mahkota dikembalikan kepada raja.<sup>140</sup> Dengan pengalihan hak dan kewajiban putra mahkota, Sultan HB VII diharapkan oleh pemerintah kolonial bersedia melakukan penandatanganan terhadap *verklaring* yang seharusnya disahkan oleh RM Putro - terutama mengenai monopoli penjualan garam di Kesultanan Yogyakarta oleh pemerintah kolonial.<sup>141</sup> Namun upaya ini tidak membuahkan hasil, karena Sultan HB VII tetap bersikukuh, bahwa ketentuan *verklaring* adalah tanggung jawab putra mahkota yang nantinya akan menjadi pewaris tahta.

Pihak pemerintah kolonial tampaknya menyadari tentang hal itu. Dan beberapa bulan kemudian setelah kondisi tenang, Residen Lieftrinck menerima perintah dari Gubernur Jenderal Idenburg, agar menanyakan kepada Sultan HB VII tentang pengganti RM Putro. Namun ada hal yang tidak biasa dalam desakan pemerintah kolonial kali itu menyangkut posisi putra mahkota, yaitu bahwa Residen Lieftrinck sudah membawa nama calon yang diajukan kepada Sultan HB

---

<sup>138</sup>ANRI, *Renvooi 3 Maret 1913 no. 5973*, lihat juga ANRI, *Komisarial 7 Maret 1913 no. 6364*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>139</sup>ANRI, *Telegram Gouvernement Secretarie 21 Februarie 1913 no. 228*, bundel *Algemeen Secretarie*. Setelah wafat RM Putro memperoleh gelar Gusti Paneran Swargi. Ia memiliki dua orang putra yaitu Pangeran Pakuningrat dan Pangeran Cakraningrat. Pangeran Pakuningrat kelak menjadi kepala bagian administrasi Kesultanan Yogyakarta dan Pangeran Cakraningrat menjadi kepala bagian urusan pasar di Kesultanan Yogyakarta. Lihat Soedarisman Poerwokoekoesoemo, *Kasultanan Yogyakarta* (Yogyakarta, 1985, Gadjahmada Univ. Press), halaman 50-51

<sup>140</sup>ANRI, *Agenda 27 Pebruari 1913 no.6364*, bundel *Algemeen Secretarie*. Lieftrinck mengingatkan kepada Idenburg bahwa seharusnya tidak pada saat yang tepat membicarakan hal itu kepada Sultan HB VII yang sedang dalam kondisi berduka.

<sup>141</sup>ANRI, *Missive Gouvernement Secretarie 20 Februarie 1913 no. 486*, bundel *Algemeen Secretarie*. Jelas rancangan ini telah disiapkan, karena pada hari RM Putro wafat, Sultan HB VII langsung disodori surat perjanjian untuk ditandatangani oleh Lieftrinck.

VII. Hal ini merupakan hal yang tidak lazim pada masa-masa sebelumnya. Dalam pemberitahuan itu, Liefcrinck berusaha membujuk Sultan agar mengangkat Pangeran Mangkukusumo, putra dari Ratu Kencono, sebagai putra mahkota dan calon pewaris tahta. Alasannya, bahwa Pangeran Mangkukusumo dianggap oleh pemerintah Belanda sebagai calon yang paling cocok.<sup>142</sup> Namun terhadap permintaan itu, Sultan HB VII menolak dengan alasan, bahwa Ratu Kencono masih berstatus sebagai permaisuri kedua, sementara Ratu Hemas sebagai permaisuri pertama masih hidup. Dengan demikian, tidak mungkin baginya untuk mengangkat Pangeran Mangkukusumo menjadi putra mahkota.<sup>143</sup> Karena keteguhan sikap Sultan ini, sampai tahun 1915, jabatan putra mahkota Kesultanan Yogyakarta belum terisi.

### 3.3 Perkawinan Politik

Ketika menghadapi tekanan dari luar dan dalam kraton - baik oleh pemerintah kolonial, maupun oleh beberapa orang kerabat raja yang merasa tidak puas terhadap kondisi dan kebijakannya - Sultan HB VII mengambil suatu langkah untuk memperkuat posisinya. Baik sebagai raja di dalam kraton, maupun sebagai penguasa Jawa di hadapan pemerintah kolonial Belanda. Langkah yang diambil Sultan HB VII adalah membuat jalinan hubungan dengan Kesultanan Surakarta, yaitu dengan cara menikahkan kerabat raja, bisa putra atau putri, antar dua kerajaan Jawa itu.

Rencana Sultan HB VII ini bisa berjalan, karena secara kebetulan ada situasi dan kondisi yang mendukung dan menguntungkan, yaitu kekosongan kursi putra mahkota di kraton Surakarta. Bila di Kesultanan Yogyakarta ada sejumlah putra yang lahir dari permaisuri sultan yang bisa dipilih menjadi putra mahkota, maka di Kesultanan Surakarta tidak ada putra yang lahir dari permaisuri. Akibatnya, hal ini memancing keributan antar keluarga raja. Sejumlah adik Sunan PB X sempat mendesak untuk bisa ditunjuk menjadi

---

<sup>142</sup>ANRI, *Missive Gouvernement Secretarie* 27 Juni 1913 no. 234, bundel *Algemeen Secretarie*. Hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan kraton tentang Mangkukusumo terlibat dalam kematian Putro. Meskipun kecurigaan itu tidak terbukti, yang pasti adalah Mangkukusumo atau ibunya mendekati Residen Liefcrinck untuk meminta dukungan bagi pencalonannya.

<sup>143</sup>GPH Mangkukusumo kelak menjadi anggota tim peralihan kekuasaan dari Sultan HB VIII kepada Sultan HB IX bulan Oktober 1939. Lihat Mohammad Roem, *Tahta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono X* (Jakarta, 1982, tp), halaman 39.

pewaris tahta. Namun, Sunan PB X menolak untuk memilih salah satu dari adiknya. Untuk mengatasi kemungkinan konflik internal, raja kemudian menyepakati untuk dibentuk suatu dewan kerajaan (*rijksraad*), yang bertugas memberikan usul kepada Sunan tentang nama-nama yang layak menjadi pewaris tahta. Namun demikian, dewan yang dibentuk pada tahun 1910 ini, akhirnya menyerahkan wewenang sepenuhnya persoalan itu kepada Sunan PB X. Sunan PB X, kemudian memilih menikahi putri Sultan HB VII di Yogyakarta, untuk dijadikan permaisuri.<sup>144</sup>

Setelah *Rijksraad* mendukung penuh rencana Sunan PB X itu, dan Residen GF. van Wijck menyampaikan persetujuan dari Gubernur Jenderal Idenburg,<sup>145</sup> pada tanggal 11 November 1912, Sunan PB X memutuskan untuk berangkat ke Kesultanan Yogyakarta meminang salah satu putri Sultan HB VII. Kedatangan Sunan PB X di kraton ini disambut dengan tembang di kalangan para putri Yogya, yang cuplikan syairnya sebagai berikut :

*Ca bawa, thek, thek, ja miling, thek, thek*  
*Sunan Sala tedhak Nyoja nitih montor, thek, thek*  
*Sing manggihi, thek, thek, thek, para putra, thek, thek*  
*Jejer wolu sing dipunghut nomer telu*<sup>146</sup>

Hai kawan marilah bernyanyi, jangan lengah  
Sunan Sala berkunjung ke Yogya menaiki mobil  
Yang menyambut adalah para putra  
Delapan orang berderet, hanya nomor tiga yang dipilih

---

<sup>144</sup>Darsiti Soeratman, 2000, *op.cit.*, halaman 327. Tampaknya pilihan Sunan PB X kepada putri dari Yogyakarta ini juga didasari pada pertimbangan politik, yaitu ada tekanan pemerintah kolonial yang semakin intensif terhadap Kesunanan Surakarta lewat kontrak-kontrak politik baru. Di samping itu, pergolakan politik yang semakin terasa di Surakarta memaksa Sunan PB X untuk mencari dukungan bagi legitimasi kekuasaannya. Alternatif yang muncul saat itu adalah menjalin hubungan dengan Kesultanan Yogyakarta.

<sup>145</sup>*Memorie van Overgave der Resident Soerakarta, G.F. van Wijk 1909-1914*, koleksi Rekso Pustoko, Mangkunegaran.

<sup>146</sup>*Serat Ingkang Sinuhun Kaping X tedak ing Kraton Ngayogyakarta amastuwi ingang Sinuhun Kanjeng Sultan Kaping VII, Senen kaping 1 Besar Jimakir 1842*, naskah koleksi Radyo Pustoko Surakarta, nomor SMP 113/4. Nama lagu itu adlah Sri Karenan, yang artinya kegembiraan raja (*sri* = raja, *karenan* = kegembiraan).

Isi tembang yang dimaksudkan di atas adalah delapan orang putri Sultan HB VII dari Ratu Kencono (muda), dan putri yang nomor tiga adalah Raden Ayu (RA) Mursudarinah. Hal ini merupakan langkah Sultan HB VII untuk mengobati kekecewaan Ratu Kencono dan Pangeran Mangkukusumo atas kegagalannya menjadi putra mahkota. Dengan lamaran Sunan Surakarta itu atas putrinya, Ratu Kencono menjadi ibu mertua Sunan PB X, dan hal ini berarti keinginan Ratu Kencono agar ada salah satu keturunannya menjadi raja, telah terkabul.

Setelah menetapkan calon permaisurinya, Sunan PB X kembali ke Surakarta. Sebagai tindak lanjut, Sultan HB VII melakukan kunjungan balasan ke Surakarta. Anjangsana ini dilakukan pada tanggal 17 Desember 1912 sebagai kesempatan untuk membicarakan persoalan perkawinan ini.<sup>147</sup>

Setibanya di Surakarta, Sultan HB VII juga disambut dengan tembang Jawa, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

*Witing klapa jawata ing ngarcapada  
Saluguning wong wanita, dhasar nyata  
Sampun nate njajah praja  
Ing Ngayogya Surakarta  
Wonten banyak nyosor ketos wonten toya  
Bagus alus gustiku jeng Sunan Sala, badhe nglamar  
Nglamar putri ing Ngayogya  
Kang daleme Mayaretna<sup>148</sup>*

Pohon kelapa ada dewa di dunia  
Sejujurnya seorang wanita, memang nyata  
Sudah pernah berkeliling kerajaan  
Di Yogyakarta dan Surakarta  
Ada angsa menyosor ketan di air

---

<sup>147</sup>ANRI, *Renvooi 8 Januari 1913 nomor 585*, bundel *Algemeen Secretarie*. Pada kesempatan ini, Gubernur Jenderal Idenburg memerintahkan residen Surakarta dan residen Yogyakarta untuk selalu memantau hubungan kedua orang raja Jawa tersebut, baik di antara mereka maupun dengan para tokoh pergerakan.

<sup>148</sup>*Serat Sri Karongron*, koleksi Radyo Pustoko Surakarta. Dalam naskah ini bukan hanya berisi lagu-lagu, tetapi juga menyebutkan dan menguraikan jenis hidangan yang disajikan dalam menyambut Sultan. Untuk melukiskannya, angka dari *sengkala* diberikan yaitu *Catur kang winarma saliraning narapati*, atau jatuh pada 7 Sura tahun Alip 1843.

Sungguh cakap gusti saya Sunan Sala, akan melamar  
Melamar putri Yogya  
Yang tinggal di Mayaretna (*kaputren* Yogya)

Penyusunan dan penyajian lagu-lagu ini menciptakan suasana keakraban di antara Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, dan berdampak sangat luas terutama di kalangan masyarakat Jawa. Hal ini terjadi karena bahwa sejak zaman Sultan HB II tidak ada lagi hubungan dengan Kesunanan Surakarta.

Dari acara saling mengunjungi ini, maka disusun kesepakatan antara dua raja, yaitu bahwa Sunan PB X kembali berkunjung ke Yogyakarta dengan tujuan melamar RA Mursudarinah, pada tanggal 6 Juli 1913, dengan tujuan melamar RA Mursudarinah.<sup>149</sup> Dalam acara tersebut, para pejabat Belanda dari Surakarta dan Yogyakarta hadir. Menyangkut peristiwa ini, Residen Yogya diinstruksikan oleh pemerintah kolonial di Batavia untuk membuat laporan lengkap dan terperinci tentang apa yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta itu.

Agenda selanjutnya adalah menentukan waktu pernikahan. Atas kesepakatan kedua raja, ditetapkan tanggal 27 Oktober 1915 sebagai hari pernikahan.<sup>150</sup> Pada saat itu juga disepakati bahwa perkawinan akan dilaksanakan di Kesunanan Surakarta. Hal ini menimbulkan suatu persoalan baru, menyangkut posisi Sultan HB VII ketika upacara pernikahan berlangsung. Tentu saja dalam upacara Sunan PB X selaku mempelai akan duduk lebih tinggi daripada Sultan HB VII. Di samping itu, di muka umum Sunan PB X akan melaksanakan *sungkeman* di depan

---

<sup>149</sup> ANRI, *Telegram Gouvernement Secretarie 8 Maret 1913 no. 2*, bundel *Algemeen Secretarie*. Dalam arsip ini dimuat tentang permohonan ijin Sunan PB X kepada Gubernur Jenderal Idenburg untuk melakukan lamaran atas putrid Sultan HB VII. Gubernur Jenderal bahkan meminta residen Yogyakarta untuk membuat terjemahan dari Bahasa Jawa ke Bahasa Belanda atas semua acara yang akan dilaksanakan.

<sup>150</sup> Persiapan pernikahan ini berlangsung sejak lama karena Sunan PB X mengadakan pesta besar-besaran. Bahkan pemerintah kolonial sendiri dilibatkan dalam hal ini. Hal ini terbukti sejak tanggal 21 Oktober 1915 Asisten Residen Petrus Blumberger telah mengumumkan lewat koran *De Nieuw Vorstenlanden* tentang persiapan di bidang keamanan dan pengumuman jalan-jalan mana yang akan ditutup untuk arak-arakan. Hanya karena ancaman penyakit pes saja maka beberapa tempat tidak lagi ditutup karena tidak dilewati oleh calon mempelai.





**FOTO<sup>151</sup> (dari kiri ke kanan) : Sultan HB VII, GRA Mursudarinah, Sunan PB X, dua abdi dalem (di belakang) dan Pangeran Puruboyo – putra mahkota Yogyakarta. Foto diambil setelah acara lamaran oleh Sunan PB X ke Kesultanan Yogyakarta usai.**

---

<sup>151</sup> Larson, George D., *Prelude to Revolution : Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942*, Dordrecht, 1987, Foris Publications, halaman 4.

mertuanya, Sultan HB VII, yang pasti akan menimbulkan banyak keberatan di kalangan para bangsawan Surakarta, karena mereka memandang kedua raja itu berstatus sama.<sup>152</sup>

Akhirnya diputuskan bahwa Sultan HB VII tidak akan hadir dalam upacara tersebut. Namun sebagai konsekuensinya, mempelai wanita yang telah bergelar Gusti Raden Ayu (GRA) Mursudarinah, tidak akan berstatus sebagai calon istri seperti istri-istri Sunan PB X sebelumnya.<sup>153</sup> Ia tetap harus sudah diakui sebagai permaisuri sejak menginjakkan kakinya yang pertama kali di Surakarta. Sunan PB X bersedia menerima syarat itu, sehingga sehari sebelumnya, ketika akad nikah dilangsungkan di kraton Surakarta, yaitu tanggal 27 Oktober 1915 pukul 9 pagi, mempelai wanita masih berada di Yogyakarta. Baru pada siang harinya, dengan menggunakan kereta api, mempelai wanita langsung berangkat menuju Surakarta - dan bersama rombongan yang mewakili Sultan HB VII - tiba di stasiun Balapan.<sup>154</sup> Dengan disambut oleh rombongan utusan Kesunanan, mereka langsung dibawa ke kraton untuk melangsungkan upacara pernikahan tersebut.<sup>155</sup> Pada saat pesta itu berlangsung, diumumkan bahwa GRA Mursudarinah kini bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan

---

<sup>152</sup>“Het huwelijk van Z.H. den Soesoehoenan” dalam *De Nieuw Vorstenlanden*, tanggal 21 Oktober 1915. Lebih-lebih dalam hal ini Sunan PB X memang ingin menampilkan kebesarannya terutama terhadap pemerintah kolonial. Ia memerintahkan agar pesta diadakan antara 26 Oktober 1915 hingga 6 November 1915 dan selama itu di beberapa tempat seperti stasiun Balapan, Taman Sriwedari, Alun-alun Utara dan Selatan tidak boleh dilalui mobil. Hal ini berarti bahwa kendaraan dinas pemerintah maupun para penyewa tanah tidak diperkenankan melewatinya.

<sup>153</sup>Hal ini kemudian terbukti pada keesokan harinya setelah upacara pernikahan, yaitu tanggal 28 Oktober 1915 BRA. Mursudarinah dinobatkan secara resmi sebagai Gusti Ratu Hemas. Keesokan harinya, Sunan PB X dan permaisuri tersebut mengadakan kirab dan pada tanggal 30 Oktober 1915 mengadakan kunjungan resmi pertama kepada residen Belanda. Lihat *De Nieuw Vorstenlanden*, tanggal 30 Oktober 1915.

<sup>154</sup>“Aankomst der Bruid”, dalam *De Nieuw Vorstenlanden*, 28 Oktober 1915. BRA Mursudarinah didampingi oleh Ratu Alit dan Ratu Maduretno sebagai saudara-saudaranya, Pangeran Adipati Haryo Hangabehi yang mewakili Sultan HB VII, Patih RA Danurejo VII dan Pangeran Prabuningrat.

<sup>155</sup>Anon, “Het Huwelijk van de Soenan”, dalam *Indische Gids*, tahun 1915, jilid II, halaman 1590-1591. Ketidakhadiran Sultan HB VII juga melegakan para pejabat Belanda yang pada mulanya masih merasa keberatan terhadap acara itu, mengingat di antara para undangan juga terdapat para tokoh pergerakan seperti Sarekat Islam, Budi Utomo dan sebagainya. Di antaranya Haji Samanhudi ikut hadir dan memberikan sambutan.

secara resmi menjadi permaisuri Sunan PB X, yang akan menurunkan pewaris tahta.<sup>156</sup>

Setelah proses perkawinan berlangsung, pengaruh dari peristiwa ini secara politik menjadi sangat besar, terutama menyangkut hubungan di antara para penguasa pribumi Jawa.<sup>157</sup> Kini antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta telah terjalin hubungan kekerabatan, yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kadipaten Pakualaman dan Kesultanan Yogyakarta. Begitu juga telah terjalin hubungan kekerabatan antara Kadipaten Mangkunegaran dan Kesunanan Surakarta. Persoalan yang masih tersisa dalam hal ini adalah hubungan antara Kadipaten Mangkunegaran dan Kesultanan Yogyakarta, yang hubungannya telah terputus sejak pemerintahan raja-raja pertama mereka.<sup>158</sup>

Pada saat pernikahan Sunan PB X dan Ratu Hemas berlangsung, Mangkunegoro (MN) VI tidak menghadirinya dengan alasan sakit. Setahun kemudian MN VI digantikan oleh Mangkunegoro (MN) VII. Penguasa baru ini melihat peta politik di antara para penguasa Jawa dan merasakan bahwa ia harus mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisinya. Langkah ini kemudian diwujudkan dengan rencana mengambil putri dari Kesultanan Yogyakarta untuk dijadikan permaisuri. MN VII menyampaikan maksud ini melalui utusannya kepada Sultan HB VII. Seperti halnya ketika Sunan PB X menyampaikan niatnya untuk melamar putrinya, Sultan HB VII memberikan kesempatan kembali kepada Ratu Kencono untuk memberikan salah satu putrinya bagi MN VII. Menerima perintah Sultan ini, Ratu Kencono dengan senang hati mempersiapkan diri untuk melakukan penyambutan kepada calon mantu.

Dalam kunjungan MN VII ke Kesultanan Yogyakarta yang berlangsung pada pertengahan 1918, putri-putri Ratu Kencono menyambutnya. Pilihan

---

<sup>156</sup> Kuntowijoyo, *Raja, Priyayi dan Kawula: Surakarta 1900-1915* (Yogyakarta, 2004, Ombak), halaman 92-93. Menurut berita yang beredar saat itu, Sunan PB X sengaja mengadakan pesta besar-besaran selama beberapa hari. Di samping tujuannya untuk menjaga wibawa terhadap Kesultanan Yogyakarta, hal itu juga untuk menunjukkan pengaruhnya di mata Belanda.

<sup>157</sup> Het huwelijik van Z.H. den Soesoehoenan”, dalam *De Nieuw Vorstenlanden*, tanggal 28 Oktober 1915. Para petinggi Belanda di *Vorstenlanden* dan di Batavia pada mulanya tidak menduga bahwa peristiwa tersebut akan benar-benar terlaksana. Pada mulanya mereka meragukan keseriusan PB X maupun dukungan dari para bangsawan Surakarta.

<sup>158</sup> Mangkunegoro I pernah menjadi menantu Sultan HB I, tetapi perkawinan ini kemudian dibubarkan seiring dengan perpecahan yang terjadi secara politik di antara mereka. Lihat P.J.F. Louw, *De Derde Javaansche Succesie Oorlog (1746-1755)* (Batavia, 1889, Albrecht & Rusche), halaman 77-78.

kemudian jatuh pada salah satu adik BRA Mursudarinah, yaitu BRA Mursudariyah. Setelah memperoleh persetujuan dari Sultan HB VII dan pemerintah Belanda, lamaran oleh MN VII ke Yogyakarta berlangsung pada bulan Desember 1918. Dalam acara ini, pembicaraan tentang pernikahan mereka juga dibicarakan, yang akhirnya disepakati pada tanggal 24 Maret 1920.<sup>159</sup>

Pada hari yang telah ditetapkan, BRA Mursudariyah berangkat ke Surakarta dan pada tanggal itu turun di stasiun kereta api Purwosari untuk selanjutnya dibawa ke Mangkunegaran. Bentuk prosesi upacara berlangsung seperti yang terjadi pada perkawinan Sunan PB X dan GRA Mursudarinah – yang bergelar GKR Hemas. Keesokan harinya, setelah upacara pernikahan berlangsung, secara resmi dari Pura Mangkunegaran diumumkan bahwa BRA Mursudariyah menyandang gelar GKR Timur.<sup>160</sup> Namun dalam hal ini, acara tidak semeriah perkawinan Sunan PB X. Kondisi kesehatan Sultan HB VII yang semakin rapuh tidak lagi banyak mendukung untuk sebuah prosesi pernikahan yang besar-besaran. Selain itu, situasi politik di kraton Yogya yang kian memanas menjelang akhir masa pemerintahannya.

Terlepas dari semua itu, perkawinan dua orang putri Yogya dengan para penguasa di Surakarta menandai suatu peristiwa politik penting dan awal perkembangan baru bagi *Vorstenlanden*, terutama sejak tahun 1812 ketika terjadi ketegangan politik yang melibatkan ketiganya. Perkawinan yang bernuansa politik ini seharusnya bisa dijadikan titik tolak dan *momentum* yang tepat bagi kemunculan kembali potensi politik raja-raja Jawa yang pada awal abad 20 semakin redup dengan dominasi kekuatan kolonial. Sementara di luar tembok kraton, tengah bangkit aktivitas dari para tokoh pribumi terpelajar dalam organisasi massa, yang mulai sadar tentang arti kebebasan dan kemerdekaan.

---

<sup>159</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van Resident A.J.W. Harloff, April 1922*, koleksi MvO DL.

<sup>160</sup> *Silsilah KGPA. Mangkunegoro VII*, koleksi Rekso Pustoko Mangkunegaran.

## BAB IV

### AKHIR PEMERINTAHAN

### SULTAN HAMENGKU BUWONO VII

Ketika GRM Putro wafat pada bulan Pebruari 1913, situasi politik di Kesultanan Yogyakarta kembali diwarnai dengan ketegangan. Setidaknya ada tiga faktor yang menciptakan kondisi dengan potensi ketegangan politik ini. Faktor pertama, adalah peluang bagi lebih dari satu orang putra Sultan HB VII untuk menduduki jabatan sebagai putra mahkota. Hal ini menimbulkan konspirasi politik di kalangan bangsawan di sekeliling raja untuk mendukung salah satu pangeran bisa menjadi calon putra mahkota. Faktor kedua, menyangkut kesehatan Sultan HB VII yang mulai menunjukkan kemunduran, yang disebabkan usianya yang sudah mencapai 70 tahun. Kesehatan raja yang menurun menimbulkan spekulasi politik di lingkungan dalam kraton. Faktor ketiga, yaitu tekanan pemerintah kolonial Belanda yang mendesak sultan, agar segera ditunjuk putra mahkota untuk keperluan menandatangani *verklaring*.<sup>161</sup>

Dalam kondisi fisik yang demikian, Sultan HB VII dituntut untuk cermat dalam memilih putra mahkota baru. Hal ini berarti Sultan wajib mempertimbangkan kelompok-kelompok kepentingan yang ada di kraton agar tidak terjebak dalam polarisasi, yang berakibat merugikan Kesultanan Yogyakarta. Posisi Sultan HB VII berada di tengah dua desakan. Di satu sisi, ada hasrat di kalangan putra-putranya untuk menjadi putra mahkota, dan di sisi lain, keinginan pemerintah kolonial agar segera bisa memperoleh kontrak baru – dengan pengisian posisi putra mahkota.

Sampai akhir masa pemerintahan Sultan HB VII pada tahun 1921, kondisi politik Kesultanan Yogyakarta diwarnai dengan kekuatan tarik-menarik seputar posisi putra mahkota antara kelompok selir dan putra raja di satu sisi, dengan pemerintah kolonial Belanda di sisi lain.

---

<sup>161</sup>Pemerintah Batavia memandang perlu pembuatan *Verklaring* karena pada saat itu akan segera dilaksanakan reorganisasi di bidang agraria di wilayah raja-raja Jawa. Beberapa persoalan yang diduga akan memudahkan pelaksanaan reorganisasi tersebut akan dicarikan solusinya dengan pencantuman sejumlah pasal sebagai tuntutan pemerintah dalam *verklaring* tersebut. Tentang hal ini dan khususnya yang menyangkut masalah agraria, lihat G. Schwenke, *Het Vorstenlandsche Grondhuurreglement in de Practijk en het Grondenrecht in Jogjakarta* (Djokja, 1932, H. Buning), halaman 18.

#### 4.1 Pengangkatan Putra Mahkota Baru

Untuk yang keempat kalinya, Sultan Hamengku Buwono VII dihadapkan pada persoalan kekosongan jabatan putra mahkota. Jabatan ini dianggap sangat strategis karena selain akan menentukan siapa yang akan menjadi raja setelah Sultan HB VII mangkat, juga akan membawa Kesultanan Yogyakarta dalam proses perkembangan dan perubahan zaman yang berlangsung. Akibatnya, pemilihan seorang pewaris tahta perlu dipertimbangkan secara mendalam agar tidak membawa dampak yang buruk bagi eksistensi Kesultanan. Namun demikian, bukan hanya Sultan HB VII yang berkepentingan bagi penunjukan calon yang tepat, pemerintah kolonial juga perlu mengawasi dan jika perlu melakukan intervensi - mengingat sosok putra mahkota merupakan mitra, sekaligus vasalnya dalam memerintah *zelfbestuur*, melalui kontrak-kontrak politik demi kepentingan pemerintah kolonial Belanda.

Persoalan ini sebenarnya sudah mulai muncul, saat permaisuri pertama Sultan HB VII, Ratu Hemas, wafat pada akhir tahun 1893 - tidak lama setelah pelantikan GRM Putro sebagai putra mahkota. Ketika Putro masih hidup, kematian Ratu Hemas belum tampak menjadi persoalan. Namun ketika GRM Putro meninggal, masalah menjadi kompleks. Hal ini disebabkan karena Sultan HB VII juga memiliki putra-putra yang lahir dari permaisuri kedua, Ratu Kencono, yang juga menghendaki posisi sebagai putra mahkota. Ratu Kencono muda - yang ketika masih selir bernama RA Retno Sriwulan - diangkat menjadi permaisuri setelah Ratu Kencono (sepuh) disingkirkan - karena terlibat kasus Suryengalagan<sup>162</sup>.

Ketika masih berstatus menjadi selir, Ratu Kencono telah melahirkan tiga belas orang anak yang terdiri atas lima orang putra dan delapan orang putri. Putra sulungnya adalah Pangeran Mangkukusumo yang lahir pada tahun 1877, dengan demikian usianya sama dengan GRM Putro. Dengan status sebagai permaisuri,

---

<sup>162</sup> Aan Kumar, *op.cit.*

Ratu Kencono mengharapkan agar putra sulungnya tersebut bisa diangkat sebagai pewaris tahta atau putra mahkota.

Tuntutan itu tidak bisa begitu saja diwujudkan, mengingat ada persoalan lain yang dihadapi oleh Sultan HB VII, yaitu bahwa RM Putro masih memiliki seorang adik pria bernama Raden Mas (RM) Soedjadi. Dengan demikian Soedjadi masih bisa dipertimbangkan sebagai pewaris tahta, karena ia adalah keturunan dari Ratu Hemas. Di samping itu, Sultan HB VII sejak awal juga memiliki hubungan baik dan sangat percaya penuh kepada Soedjadi. Hal ini terbukti dari dua hal. Pertama, Soedjadi langsung mendapatkan nama gelar, yaitu Pangeran Haryo Puruboyo - setelah GRM Putro meninggal. Nama ini menunjukkan, bahwa Soedjadi kelak akan memegang peranan penting dalam percaturan politik di kraton, seperti nama mendiang GRM Putro yang mendapatkan gelar Pangeran Adipati Puruboyo.

Bukti kedua, yaitu kepercayaan Sultan HB VII kepada Soedjadi bisa dilihat dengan penyerahan wewenang kepada Soedjadi untuk mengelola keuangan pribadi raja. Bahkan Soedjadi disertai sepenuhnya memegang kunci peti uang pribadi raja dan menyimpannya di almari yang terdapat di kamar tidur Sultan. Ada dua kunci dari almari itu, yang satu dipegang oleh Sultan sendiri dan yang lain oleh Soedjadi. Dengan demikian, Soedjadi bertanggung-jawab atas keuangan raja dan selalu dilibatkan dalam penyusunan anggaran kraton.

Kedua hal tersebut menjadi penghalang hasrat Ratu Kencono untuk mengajukan Mangkukusumo sebagai calon pewaris tahta. Namun demikian, Mangkukusumo mendapatkan dukungan dari beberapa bangsawan tinggi yang berpengaruh di dalam kraton. Di antaranya, kakak sulung Sultan HB VII, Pangeran Adipati Aryo Mangkubumi, yang merupakan ayah mertua Mangkukusumo - yang juga menghendaki agar menantunya itu bisa menjadi pewaris tahta. Meskipun Puruboyo juga merupakan menantu Pangeran Mangkubumi, namun Pangeran Mangkukusumo lebih diunggulkan, karena menurut Mangkubumi, sosok Mangkukusumo lebih cocok menjadi raja daripada Puruboyo.<sup>163</sup>

---

<sup>163</sup> ANRI, Surat Lieftrinck kepada Gubernur Jenderal Idenburg tanggal 20 Mei 1913 nomor 66, bundel *Algemeen Secretarie*. Kesan Lieftrinck terhadap Mangkubumi adalah sosok yang konservatif dan ambisius berkuasa. Mungkin juga ia memiliki ambisi menjadi raja, namun karena

Dengan demikian, di kraton Kesultanan Yogya setelah kematian Pangeran Putro terdapat polarisasi antara kelompok-kelompok kepentingan elit kraton. Puruboyo sendiri mendapatkan dukungan dari beberapa orang saudaranya, termasuk Patih Danurejo VII dan Pangeran Hangabehi. Namun keduanya tidak menunjukkan sikap secara terbuka, karena takut terhadap Sultan HB VII. Sejak Ratu Hemas wafat, Sultan HB VII sendiri semakin dekat hubungannya dengan Ratu Kencono sebagai satu-satunya permaisuri. Hal ini terbukti dengan putra Pangeran Putro yang masih bayi dititipkan kepada Ratu Kencono.

Sebelum penetapan calon putra mahkota, terutama antara Puruboyo dan Mangkukusumo, Sultan HB VII sebenarnya memiliki sebuah rencana. Berita yang beredar di kalangan kraton, bahwa putra dari Pangeran Putro akan dicalonkan menjadi pengganti ayahnya. Ketika Sultan HB VII menyampaikan maksudnya untuk mengangkat anak itu menjadi putra angkatnya, maka hal itu menjadi kabar spekulatif, bahwa putra angkat - yang sebenarnya adalah cucu Sultan - bisa dicalonkan sebagai pewaris tahta. Namun secara tiba-tiba anak yang dirawat oleh Ratu Kencono tersebut jatuh sakit. Dokter kraton, Wagener, yang dipanggil untuk memeriksanya, hanya bisa melihat keadaan anak itu yang tiba-tiba kejang dan beberapa jam kemudian meninggal.<sup>164</sup>

Berita meninggal anak Pangeran Putro sangat mengejutkan kalangan luas, dan kemudian menimbulkan desas-desus yang dikait-kaitkan dengan mitos yang sebelumnya telah beredar. Mitos ini menyangkut kutukan dari Sultan HB VI menyangkut pernikahan putranya, Pangeran Hangabehi ( nama muda Sultan HB VII) dengan RA Retno Purnomo - nama muda Ratu Hemas. Pada dasarnya, Sultan HB VI tidak menyukai Raden Tumenggung (RT) Joyodipuro, ayah Retno Purnomo. Namun karena didesak terus oleh putranya, HB VI akhirnya

---

statusnya sebagai putra selir, Mangkubumi tidak mungkin diangkat. Untuk melampiaskan keinginannya, ia menghendaki Mangkukusumo duduk di atas tahta. Puruboyo dikatakannya tidak menghormati orangtua oleh Mangkubumi. Jadi ada dugaan bahwa Mangkubumi tidak mudah mengendalikan Puruboyo jika ditetapkan sebagai pewaris tahta.

<sup>164</sup>ANRI, Surat Lieftrinck kepada Idenburg tanggal 20 Mei 1913 nomor 66, bundel *Algemeen Secretarie*. Wagener yang ditanya oleh Lieftrinck juga tidak bisa memastikan penyakit apa yang diderita oleh anak tersebut, tetapi yang jelas bukan merupakan penyakit turunan dari ayahnya. Dua peristiwa ini mulai menimbulkan kecurigaan pada Lieftrinck adanya konspirasi di kraton antara dua kubu : kelompok Ratu Hemas dan kelompok Ratu Kencono. Lieftrinck sendiri dalam suratnya yang terakhir telah berubah penilaiannya terhadap kelompok-kelompok itu dibandingkan dengan suratnya pada bulan Pebruari 1913.



mengizinkan keinginan anaknya menikah dengan putri Joyodipuro. Menurut kepercayaan masyarakat Yogya, Sultan HB VI memberi izin tapi dengan syarat, yaitu perkawinan bisa dilaksanakan, tetapi Retno Purnomo tidak bisa menjadi permaisuri. Syarat ini sebenarnya menutup peluang keturunan Retno Purnomo untuk bisa menduduki tahta. Namun ternyata Sultan HB VII telah melanggar larangan ayahnya dengan mengangkat Retno Purnomo menjadi permaisuri dengan gelar Ratu Hemas. Akibatnya putra-putranya hampir tidak ada yang mampu bertahan sebagai putra mahkota.<sup>165</sup>

Terlepas dari desas-desus tersebut, hubungan di kraton tetap menunjukkan ketegangan. Pangeran Puruboyo yang mendapatkan kepercayaan sebagai bendahara pribadi Sultan tampaknya sulit untuk disisihkan oleh kelompok Ratu Kencono, yang menjagokan putranya, Mangkukusumo, menjadi putra mahkota. Posisi Puruboyo ini sangat strategis, karena ikut menentukan pembiayaan proyek-proyek kraton. Dengan demikian, Puruboyo sudah ikut terlibat dalam menentukan kebijakan Kesultanan Yogyakarta di kemudian hari.

Secara tiba-tiba kondisi itu berubah dengan adanya suatu peristiwa yang nyaris menyingkirkan Puruboyo, bukan hanya dari menghapus kesempatannya menjadi calon pewaris tahta, tetapi bahkan mengancamnya menjadi seorang terdakwa di depan pengadilan *Pradatta Agung*. Peristiwa mengagetkan itu terjadi pada awal bulan April 1913, belum sampai seratus hari dari waktu kematian Pangeran Putro dan belum sampai empat puluh hari kematian putranya. Dalam suasana masih berduka, ada laporan dari Raden Wedono Atmo Soewito kepada Sultan HB VII, bahwa Pangeran Puruboyo telah mengambil sebagian uang pribadi Sultan HB VII yang dipercayakan kepadanya. Untuk mendukung laporan ini, Atmo Soewito yang merupakan kepercayaan Sultan HB VII mengatakan, bahwa jumlah uang yang dihitung dan dilaporkan tidak sesuai dengan jumlah uang yang sebenarnya.

Ketika Sultan HB VII mendengar laporan itu, ia berniat untuk mencari pembuktiannya. Dengan meyakinkan, Atmo Soewito memberikan keterangan yang menghubungkan kasus kehilangan itu dengan suatu peristiwa sebelumnya, yaitu ketika Pangeran Puruboyo melangsungkan pernikahan dengan istrinya, KRA

---

<sup>165</sup> Catetan trah Dalem Para Putra Wayah Sultan HB VII.

Hamengkunegoro. Biaya yang dikeluarkan untuk pernikahan itu ternyata melebihi anggaran yang disediakan. Selain itu, Puruboyo juga tidak mampu membayar hutangnya, ketika ia harus membayar perabotan rumahtangganya untuk menempati *Dalem Purubayan* - sehingga ia perlu meminjam uang kepada Sultan HB VII sebanyak f 20.000. Untuk melunasi semua itu, Puruboyo tentu saja harus mencari uang, karena gajinya sebagai bendahara raja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya dan pembayaran hutangnya. Jadi wajar, apabila Puruboyo mengambil uang itu untuk melunasi hutangnya.

Mendengar keterangan tersebut, Sultan HB VII menjadi sangat marah terhadap Puruboyo. Kondisi yang memojokkan Puruboyo ini dimanfaatkan oleh Ratu Kencono untuk membujuk kembali Sultan HB VII, dan mendesak agar suaminya segera menyisihkan Pangeran Puruboyo sebagai calon putra mahkota. Sebagai gantinya, sebaiknya Sultan HB VII mengangkat Pangeran Mangkukusumo, putra sulung Ratu Kencono. Tanpa berpikir panjang, Sultan HB VII menyetujui permintaan permaisurinya itu, dan dalam pertemuan dengan Residen Liefrinck di kraton pada tanggal 25 April 1913, Sultan HB VII menyampaikan niatnya untuk mengangkat Mangkukusumo sebagai putra mahkota dan meminta dukungan serta persetujuan pemerintah Belanda.

Liefrinck yang mendengar alasan Sultan HB VII untuk menyisihkan Puruboyo karena dituduh mencuri uang, tidak langsung mengabulkan permohonan Sultan. Sebaliknya, ia mencoba mencari informasi dari sejumlah petinggi kraton. Dari Patih Danurejo VII, Liefrinck mendengar keterangan, bahwa Raden Wedono Atmo Soewito bersama Soelebar adalah abdi kepercayaan Sultan HB VII. Karena kedekatannya dengan raja, kedua abdi ini diperkenankan bebas bergerak termasuk di ruang-ruang pribadi raja. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa kunci peti uang diambil oleh Atmo Soewito sendiri. Ketika kembali menemui Sultan HB VII, Residen Liefrinck meminta raja itu agar melakukan pemeriksaan khusus terhadap Puruboyo dan orang-orang lain yang terkait. Namun, Sultan HB VII menolaknya. Hal ini menimbulkan kecurigaan Liefrinck, bahwa ada rekayasa di balik kasus ini, sehingga ia mengusulkan

kepada Gubernur Jenderal Idenburg, agar masalah pencalonan putra mahkota Yogyakarta ditunda.<sup>166</sup>

Sampai pergantian Lieftrinck dengan BL. van Bijleveld sebagai residen pada bulan November 1913 (Lieftrinck meletakkan jabatannya bulan April 1913 dan digantikan oleh penjabat sementara Coerts), jawaban pemerintah Batavia terhadap persoalan pencalonan putra mahkota masih sama. Gubernur Jenderal menyetujui penundaan pemilihan itu dan menghendaki agar persoalan Puruboyo segera bisa diselesaikan. Di samping itu pemerintah Batavia tetap bertahan pada prinsip, agar proses pergantian tahta jangan melanggar aturan-aturan tradisi yang berlaku, yaitu keturunan permaisuri yang sah.<sup>167</sup> Oleh karena itu pada tanggal 21 Pebruari 1914, Bijleveld membicarakan hal tersebut dengan Patih Danurejo VII. Atas inisiatif patih, Wedono Atmo Soewito harus diamankan, karena dia adalah orang yang dianggap menjadi sumber utama informasi kehilangan uang kepada Sultan HB VII. Setelah Patih Danurejo VII mengamankan Atmo Soewito, Bijleveld mendatangi kraton dan menemui Sultan HB VII. Akhirnya, atas tekanan Bijleveld, Sultan HB VII bersedia untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap kasus Puruboyo.

Pada tanggal 7 Maret 1914, setelah dipanggil, Puruboyo menghadap Sultan HB VII bersama seorang asistennya, yaitu Lurah Atmo Condrokusumo. Dalam pertemuan itu, Puruboyo melaporkan, bahwa orang yang menghitung uang milik Sultan HB VII adalah Lurah Atmo Condrokusumo. Mengingat sebagian besar uang itu terdiri atas lembaran kertas dan merupakan uang Belanda (*Bilyet*, mungkin dicetak oleh Java Bank), Lurah Atmo Condrokusumo tidak memahaminya dan menganggap jumlah nilainya sama seperti uang logam. Akibatnya, jumlah yang dicatat oleh Sultan HB VII berdasarkan laporan Lurah Atmo Condrokusumo berbeda dengan ketika kotak itu dibuka oleh Sultan HB VII dan dihitung oleh Wedana Atmo Soewito. Mengingat kunci yang digunakan untuk membuka peti hanya dipegang oleh Puruboyo, selain oleh Sultan sendiri,

---

<sup>166</sup> ANRI, *Kommisarial tanggal 7 Juni 1913 no. 888, bundel Algemeen Secretarie.*

<sup>167</sup> ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 27 Juni 1913 no. 234, Bundel Algemeen Secretarie.*

perbedaan jumlah ini menimbulkan kecurigaan yang mengarah hanya kepada Puruboyo sebagai orang yang mengambil uang tersebut.<sup>168</sup>

Ketika peti itu kemudian dikeluarkan dan jumlah uang yang berada di dalamnya dihitung kembali oleh Puruboyo di depan Sultan HB VII secara benar, jumlahnya menjadi sama dan sekaligus membantah tuduhan pencurian uang itu. Pada hari itu juga, Sultan HB VII mengirimkan berita kepada Residen Bijleveld, yang sekaligus memberitahukan bahwa sumber persoalan ini adalah Wedono Atmo Soewito. Wedono itu kemudian dituduh oleh Sultan HB VII telah memfitnah Puruboyo dan memperburuk namanya sebagai putra raja. Sebagai hukuman, Sultan HB VII memutuskan untuk memecatnya dan mengusirnya dari kraton.

Dampak dari peristiwa ini cukup luas dan tidak hanya terbatas pada persoalan kraton. Sultan HB VII kembali mempercayai Puruboyo, dan bahkan sejak itu ia segera mengajukan Puruboyo sebagai calon putra mahkota. Hal ini berarti bahwa peluang Pangeran Mangkukusumo dan kelompoknya untuk menduduki kursi pewaris tahta tidak ada lagi.<sup>169</sup> Meskipun tidak ada tindakan lebih lanjut untuk menghubungkan Atmo Soewito dengan kelompok Mangkukusumo dan Mangkubumi, pemulihan kepercayaan Sultan atas Puruboyo sudah menghentikan ambisi Ratu Kencono bagi pencalonan putranya, Mangkukusumo.<sup>170</sup>

Setelah situasi semakin jelas dan ketegangan mereda, Residen Bijleveld kembali mengadakan kunjungan resmi ke kraton pada tanggal 30 Maret 1914.

---

<sup>168</sup> ANRI, Surat Sultan Hamengku Buwono VII kepada Residen Bijleveld tanggal 6 Mei 1914, dalam *Mailrapport nomor 1558/4*, bundel *Algemeen Secretarie*. Hal yang menarik adalah bahwa Atmo Soewito tidak dihadapkan kepada pengadilan, tetapi hanya dipecat dan diusir dari kraton. Hukuman ini dianggap ringan bagi seseorang yang mengadu domba raja dan putranya, serta memperburuk nama seorang calon putra mahkota. Barangkali Sultan HB VII sudah mencurigai, bahwa Atmo Soewito bukan pemilik inisiatif dalam kasus ini, dan ia terkait dengan salah satu kelompok penting dalam kraton. Tidak tertutup kemungkinan pengusiran Atmo Soewito adalah untuk menyelamatkan orang yang memerintahkannya dari penangkapan dan penghukuman oleh Belanda, seperti yang dilakukan oleh Sultan HB VII terhadap Ratu Wandan dan Pangeran Juminah.

<sup>169</sup> ANRI, Surat Sultan Hamengku Buwono VII kepada Residen Bijleveld tanggal 12 Maret 1914, dalam *Mailrapport nomor 1558/14*, bundel *Algemeen Secretarie*. Struktur kalimat dalam surat ini menunjukkan perubahan pandangan Sultan, yang sangat berbeda dengan kata-kata surat sebelumnya terutama tentang Puruboyo. Apakah ini berasal dari euforinya karena berhasil membebaskan Puruboyo dari persoalan ataukah untuk memenuhi tuntutan pemerintah kolonial, tidak bisa dijelaskan.

<sup>170</sup> ANRI, *Komisarial tanggal 11 Juni 1914 no. 1252*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Dalam kunjungan ini, selain menerima penjelasan oleh Sultan HB VII tentang pemulihan nama Puruboyo, Bijleveld juga diminta agar menyampaikan permohonan Sultan HB VII bagi persetujuan Gubernur Jenderal atas status putra mahkota. Kendati Puruboyo telah diusulkan, namun Sultan HB VII tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat di Batavia, apabila Gubernur Jenderal Idenburg akan menunjuk Pangeran Mangkukusumo. Setelah membandingkan antara dua calon itu, Residen Bijleveld menilai, bahwa Puruboyo lebih terbuka dalam berhubungan dengan dunia di luar kraton dan memiliki kepandaian khusus, daripada Mangkukusumo. Karena itu, Bijleveld kemudian mengusulkan kepada Idenburg, agar mengabulkan permohonan Sultan HB VII bagi pencalonan Puruboyo. Dasar pertimbangan Bijleveld, di samping faktor kepribadian Puruboyo, yaitu bahwa penundaan penunjukan putra mahkota akan berdampak buruk bagi politik di kraton. Hal ini disebabkan oleh intrik-intrik dari pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga penetapan putra mahkota akan segera mengakhiri situasi itu.<sup>171</sup>

Dengan mengikuti perkembangan yang terjadi di Kesultanan Yogyakarta, melalui laporan Residen Bijleveld, pemerintah kolonial memiliki dugaan, bahwa di dalam kraton sendiri terdapat konspirasi politik yang - meskipun tidak terbuka jelas - mengarah kepada kelompok di sekitar Ratu Kencono dan Pangeran Mangkubumi. Mereka tidak menghendaki keturunan Ratu Hemas menaiki tahta dan berusaha keras agar Pangeran Mangkukusumo menjadi pengganti Sultan. Di mata para petinggi kolonial di Batavia, Sultan HB VII sendiri menyadari hal tersebut. Tetapi karena dirinya berada di bawah pengaruh Ratu Kencono, Sultan HB VII tidak bisa berbuat banyak kecuali mengikuti keinginan mereka. Bahkan Gubernur Jenderal Idenburg menganalisa, bahwa penyingkiran Puruboyo sebagai calon pewaris tahta justru dilakukan oleh Sultan HB VII untuk menyelamatkan jiwa putranya itu dari nasib yang sama, seperti yang dialami oleh Pangeran Putro dan putranya. Pihak pemerintah Belanda mencurigai, bahwa kedua orang

---

<sup>171</sup>ANRI, Surat Residen Bijleveld kepada Gubernur Jenderal Idenburg tanggal 30 Mei 1914 nomor 94, bundel *Algemeen Secretarie*. Salah satu tanda konspirasi yang ditemukan oleh Bijleveld di kraton adalah adanya desas-desus bahwa pemerintah Batavia ingin menghapuskan Kesultanan Yogyakarta, mengingat kesegaran Gubernur Jenderal menunjuk putra mahkota didasarkan pada dugaan bahwa Belanda memang menghendaki Sultan HB VII yang sudah tua meninggal dan tidak digantikan oleh siapapun.

pangeran tersebut sengaja dibunuh untuk membuka jalan bagi Mangkukusumo menduduki posisi sebagai pewaris tahta.<sup>172</sup>

Setelah mendapatkan pertimbangan dari Residen Bijleveld, pemerintah di Batavia bermaksud untuk menyetujui permohonan Sultan bagi penunjukan putra mahkota. Pilihannya sudah jelas jatuh kepada Puruboyo.<sup>173</sup> Pertanda awal dari pilihan pemerintah Belanda ini adalah keluar keputusan untuk memberikan pangkat letnan kolonel kepadanya Puruboyo. Padahal, sejak tahun 1902 bersama Pangeran Ario Mangkukusumo, Puruboyo telah menerima pangkat mayor.<sup>174</sup> Dengan menerima pangkat ini, berarti kedudukan Puruboyo menjadi lebih tinggi daripada Mangkukusumo. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk menaiki tahta telah terbuka lebar bagi Puruboyo.<sup>175</sup>

Pengukuhan Puruboyo sebagai putra mahkota secara resmi hanya tinggal menunggu waktu. Dan tanda-tanda itu makin nyata, ketika pada tanggal 13 Juli 1914 Gubernur Jenderal Idenburg di Batavia memberikan persetujuan melalui Residen Bijleveld untuk disampaikan kepada Sultan Yogyakarta. Dalam persetujuan itu ditetapkan, bahwa Pangeran Ario Puruboyo diakui sebagai pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta dan bakal pengganti Sultan Hamengku Buwono VII dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo

---

<sup>172</sup>ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris 13 Juli 1914 nomor 299*, bundel *Algemeen Secretaris*. Tampaknya dugaan Idenburg dan para pejabat kolonial lainnya tentang hal ini kurang tepat. Jika Sultan HB VII menyadari bahwa kematian Pangeran Putro dan putranya adalah akibat dari suatu rekayasa, tentu raja ini sudah memerintahkan adanya penyelidikan oleh dokter kraton. Sementara itu Dr. Wagener yang ditempatkan oleh pemerintah kolonial di kraton sendiri menyatakan bahwa kematiannya disebabkan oleh disentri dan lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung karena kurangnya udara dan cahaya. Sementara itu jika Sultan HB VII ingin menyelamatkan Puruboyo dari ancaman tersebut, tidak perlu ada rekayasa tentang pencurian uang, sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang pangeran dan putra raja terhadap ayah dan rajanya sendiri. Hal ini jelas terbukti bahwa setelah terungkapnya kasus itu, justru Sultan HB VII sangat berniat untuk mencalonkan Puruboyo sebagai pewaris tahta.

<sup>173</sup>ANRI, *Telegram Gouvernement Secretaris tanggal 11 Juni 1914 no. 811*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>174</sup>ANRI, *Besluit 9 Februarie 1902 nomor 17*, bundel *Algemeen Secretarie*. Ada ketentuan dalam struktur militer Hindia Belanda bahwa raja-raja Jawa dan para bangsawan tinggi menerima pangkat militer titular. Sultan dan Sunan menerima pangkat militer Jenderal Mayor sementara para putranya dan saudara kandungnya menerima pangkat Mayor. Sementara itu, bagi putra mahkota, pangkat yang diberikan adalah Letnan Kolonel. Untuk para pangeran merdeka seperti Mangkugoro dan Pakualam, mereka menerima pangkat titular Kolonel.

<sup>175</sup>ANRI, *Agenda no. 1252/14*, bundel *Algemeen Secretarie*. Para putra mahkota Yogyakarta sebelumnya, termasuk mereka yang wafat, juga telah menerima pangkat-pangkat militer tersebut. Hal ini menunjukkan dukungan pemerintah Batavia kepada yang bersangkutan kelak untuk menjadi raja. Lihat juga pertimbangan dari panglima angkatan darat Hindia Belanda dalam ANRI, *Telegram Gouvernement Secretaris, tanggal 14 Juli 1914 no. 1017*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Rojoputro Narendro Mataram.<sup>176</sup> Pelantikannya akan dilakukan oleh Residen Bijleveld, yang dalam hal ini mewakili Gubernur Jenderal, sekaligus juga sebagai wakil dari pemerintah Hindia Belanda.

Keesokan harinya setelah surat keputusan ini dikeluarkan, Bijleveld menerima perintah dari Idenburg untuk mengadakan persiapan bagi pelantikannya. Ia kemudian memberitahukan keputusan Idenburg itu kepada Sultan HB VII dan berdasarkan perhitungan Jawa, tanggal pelantikan ditetapkan pada 23 Sawal tahun Bhe 1844 atau 14 September 1914 – atau dilangsungkan setelah bulan Puasa. Pada tanggal itu, di Bangsal Pagelaran Kraton Yogyakarta, Pangeran Ario Puruboyo dikukuhkan sebagai pewaris tahta di Kesultanan Yogyakarta oleh Sultan Hamengku Buwono VII dan Residen Bijleveld. Upacara ini berlangsung sesuai dengan adat dan tradisi Jawa yang berlaku di Kesultanan Yogyakarta, dengan dihadiri oleh para bangsawan tinggi Kesultanan Yogyakarta, Pangeran Adipati Ario Pakualam VII, Patih RAA Danurejo VII, dan para pejabat Belanda serta pejabat pribumi di Yogyakarta. Dengan demikian secara resmi Puruboyo telah mendapatkan gelar sebagai Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro Sudibyo Rojoputro Narendro Mataram.<sup>177</sup>

#### **4.2. Peran Puruboyo**

Setelah pelantikan Pangeran Ario Puruboyo menjadi putra mahkota, Sultan HB VII menunjukkan kegembiraannya atas peristiwa ini. Ia mengirimkan surat ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Gubernur Jenderal Idenburg yang dianggapnya telah menyelesaikan persoalan kekosongan putra mahkota dengan memperkenalkan pelantikan Puruboyo. Namun demikian, dalam sambutan balasannya, Idenburg menyisipkan kata-kata, bahwa Pangeran Puruboyo diharapkan bisa tampil sebagai seorang raja modern yang mampu memerintah Kesultanan Yogyakarta menuju kondisi sejahtera. Untuk itu, cara

---

<sup>176</sup>ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 13 Juli 1914 no. 41*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>177</sup>ANRI, *Verklaring van Soeltan Hamangkoeboewono zevende 26 van de maand Sawal van het jaar Bhe 1844*, bundel *Algemeen Secretarie*. Hal yang menarik adalah bahwa dalam upacara tersebut, Ratu Kencono ikut hadir menyaksikannya. Namun demikian, Sultan HB VII melarang diadakan acara yang berlebihan seperti yang sebelumnya terjadi pada setiap pelantikan putra mahkota. Mungkin saja hal ini terkait dengan situasi yang kurang kondusif secara politik di kraton Yogya dan untuk mencegah agar tidak terjadi potensi konflik yang berlebihan dari pihak-pihak yang berkonspirasi.

yang harus ditempuh adalah menyingkirkan semua adat dan tradisi lama yang dianggap tidak relevan dengan zaman, dan menghapuskan semua pandangan yang dianggap merintang proses pencapaian tujuan itu (*verouderde gebruiken en instellingen ter zijde stelt, en belemmerende vooroordeelen verwerpt*).<sup>178</sup>

Selain itu, Gubernur Jenderal Idenburg juga menyerahkan tanggungjawab kepada Residen Yogyakarta untuk mengawasi perkembangan lebih lanjut putra mahkota, hingga kelak menduduki jabatan sebagai Sultan.<sup>179</sup> Hal ini berkaitan dengan persoalan yang masih menjadi pokok pembicaraan antara pemerintah kolonial di Batavia dan Kesultanan Yogyakarta, yaitu persoalan ganti rugi keuangan sehubungan dengan reorganisasi agraria yang dilaksanakan di Kesultanan Yogyakarta, dan juga berkenaan dengan hutang-hutang Sultan HB VII kepada pemerintah. Hutang-hutang ini kebanyakan berasal dari kebutuhan pribadi Sultan HB VII, terutama untuk membiayai tenaga keamanan yang digunakan di kraton dari tanggal 1 Januari 1906 sampai 1 Januari 1914. Karena masa sewa mereka sudah berakhir, pembayaran wajib dilakukan. Namun mengingat Sultan HB VII belum mampu membayarnya, pemerintah Belanda melunasi terlebih dahulu. Ketika pada awal Juli 1914, hal ini ditanyakan kepada Sultan, jawabannya selalu mengaitkannya dengan uang kasnya yang hilang, sehingga persoalan ini tidak bisa diselesaikan.<sup>180</sup>

Dalam membicarakan persoalan hubungan keuangan antara pemerintah kolonial Belanda dan Kesultanan Yogyakarta, kini Puruboyo memiliki dua fungsi. Di satu sisi, ia adalah seorang putra mahkota dan di sisi lain ia tetap dipercaya sebagai bendahara Sultan.<sup>181</sup> Salah satu langkah penting yang diambil olehnya adalah perubahan bagi pengaturan keuangan Kesultanan Yogyakarta yang telah ditetapkan sejak bulan Januari 1911 dan kemudian diganti dengan pengaturan

---

<sup>178</sup> ANRI, *Agenda nomor 29749/14*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>179</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 17 October 1914 no. 21*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>180</sup> ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 3 Julki 1914 nomor 1936*. Meskipun Sultan HB VII telah menerima pembayaran dari pemerintah Belanda sebagai ganti rugi atas biaya persiapan reorganisasi agraria, uang ini tidak bisa digunakan untuk melunasi hutang tersebut karena masalah keamanan dianggap sebagai persoalan pribadi raja. Jadi Sultan wajib membayar dengan uangnya sendiri, yang kasnya dipegang oleh Puruboyo. Lihat juga ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 18 Mei 1914 nomor 63*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>181</sup> ANRI, *Memorie van Overgave van Residen Lieftrinck, 1911-1915, reel no. 4*, bundel *MvO DL*, halaman 17. Lieftrinck melihat bahwa Puruboyo sejak awal sudah menunjukkan kecerdasannya terutama ketika berbicara tentang masalah keuangan.



keuangan yang baru dan diberlakukan sejak 1 Desember 1914. Peraturan keuangan ini menampung semua ganti rugi yang dibayarkan oleh pemerintah Belanda atas dampak yang ditimbulkan oleh proses reorganisasi agraria terhadap Kesultanan Yogyakarta.<sup>182</sup>

Residen Bijleveld yang berunding dengan Sultan dan Puruboyo mengamati bahwa Puruboyo merupakan sosok yang memiliki kemampuan untuk tampil sebagai seorang raja yang pandai. Tetapi menurutnya, Puruboyo perlu lebih memperdalam pengetahuannya, terutama tentang ilmu pengetahuan dari Barat yang semakin diperlukan bagi tuntutan perubahan zaman modern. Cara untuk mewujudkan hal itu adalah dengan memberikan Puruboyo pendidikan menurut sekolah modern. Meskipun Sultan HB VII telah membuka sebuah sekolah dasar untuk kerabat raja dan putra-putranya di kraton pada tanggal 1 Agustus 1890,<sup>183</sup> pendidikan ini hanya terbatas pada sekolah dasar setara dengan *Hollandsch Inlandsche School*<sup>184</sup>, sehingga bagi Puruboyo wajib untuk meneruskan pada tingkat lebih tinggi.

Namun karena di Yogyakarta dan sekitarnya tidak terdapat sekolah lanjutan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menyiapkan Puruboyo, Residen Bijleveld mengusulkan kepada Sultan HB VII, agar Puruboyo melanjutkan pendidikannya ke lain tempat dan untuk sementara meninggalkan kraton. Untuk hal ini, Sultan HB VII menyerahkan sepenuhnya kepada Bijleveld. Namun sebelum hal ini terlaksana, van Bijleveld telah digantikan oleh pejabat baru yang bernama C. Canne pada bulan April 1915. Canne meneruskan persoalan pendidikan Puruboyo tersebut dan melaporkannya kepada Gubernur Jenderal Idenburg. Namun Gubernur Jenderal Idenburg belum sempat mengeluarkan keputusan soal itu, ketika dirinya juga ditarik ke Belanda dan kedudukannya digantikan oleh J.P. Graaf van Limburg Stirum pada bulan Maret 1916. Van

---

<sup>182</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 6 November 1914 no. 22*, lihat juga ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 4 Januari 1911 no. 52*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>183</sup> ANRI, *Algemeen Verslag der Residentie Jojgokarta over het jaar 1890*, Bundel Yogya No. 325.

<sup>184</sup> HIS merupakan sebuah sekolah dasar tujuh tahun dengan bahasa pengantar Belanda bagi anak-anak pribumi. Sekolah ini merubah perubahan dari sekolah dasar klas-1 (*eerste-class Inlandsche School*) yang didirikan sejak tahun 1891 sebagai sekolah dasar pribumi lima tahun. Lihat I.J. Brugmans, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch Indië* (Groningen, 1938, J.B. Wolters Uitgevers-Maatschappij), halaman 317.

Limburg Stirum tidak segera memberikan keputusan tentang hal ini. Baru setengah tahun kemudian, Canne menerima izin dari van Limburg Stirum untuk menyampaikan jawaban kepada Sultan HB VII. Dalam jawaban ini, Puruboyo diperkenankan untuk mengunjungi pendidikan di kota lain. Untuk itu dalam pembicaraan yang berlangsung pada awal September 1916, Puruboyo memilih kota Surabaya sebagai tempat kunjungan belajarnya.<sup>185</sup>

Di Surabaya, Puruboyo hanya tinggal beberapa bulan pada sebuah keluarga Eropa. Hal ini dimaksudkan agar Puruboyo bisa belajar Bahasa Belanda dan tata pergaulan budaya Eropa, sehingga nantinya setelah menjadi raja, ia akan mampu memahami bagaimana cara berpikir dan bertindak orang Eropa. Sepanjang masa belajarnya itu, ia berada di bawah pengawasan Residen Surabaya, sementara Sultan HB VII yang membiayai seluruh kebutuhan hidupnya. Setelah beberapa bulan belajar di Surabaya, pada bulan Pebruari 1917, Puruboyo kembali ke Yogyakarta.

Setibanya di Yogyakarta, Sultan HB VII memandang perlu bahwa Puruboyo sudah saatnya tampil lebih banyak dalam acara resmi kraton dalam rangka mewakili raja. Di samping Sultan yang usianya sudah tua dan kesehatannya yang terus menurun, penampilan Puruboyo juga dianggap bermanfaat bagi kebutuhannya untuk menyiapkan diri sebagai seorang calon Sultan. Hal ini terutama dilakukan dalam pertemuan-pertemuan resmi dengan para pejabat pemerintah kolonial yang kelak akan selalu berhubungan dengan dirinya.

Salah satu peristiwa penting yang harus dialami oleh Puruboyo selama berstatus sebagai putra mahkota adalah kunjungannya kepada Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi di Hindia Belanda. Hal ini merupakan kewajiban tak tertulis dari seorang putra mahkota atau calon pewaris tahta untuk menghadap penguasa kolonial dengan maksud memperkenalkan diri dan meminta restu serta

---

<sup>185</sup>ANRI, *Renvooi tanggal 8 September 1916 nomor 50*, bundel *Algemeen Secretarie*. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa Puruboyo memilih kota Surabaya sebagai alasan untuk meneruskan studinya. Pada tahun yang sama, yaitu bulan Pebruari 1916, terjadi peristiwa penting di Mangkunegaran. Mangkunegoro VI turun tahta dan digantikan oleh kemenakannya Mangkunegoro VII pada bulan Januari 1916. Sebulan kemudian Mangkunegoro VI meninggalkan Surakarta dan pindah ke Surabaya bersama keluarganya untuk bermukim di sana. Apakah kunjungan Puruboyo ke Surabaya ada kaitannya dengan peristiwa ini, atautkah ia berniat untuk bertemu dengan Mangkunegoro VI, tidak bisa dipastikan. Tentang peristiwa Mangkunegoro VI ini lihat George D. Larson, *Prelude to Revolution : Palaces and Politics in Surakarta, 1912-1942* (Providence, 1987, Foris Publ.), halaman 63.

dukungan, agar kelak proses perjalanannya menuju tahta tidak mengalami hambatan. Diharapkan agar pemerintah Belanda berkenan untuk melindunginya dan mengakui statusnya sebagai calon pewaris tahta di suatu kerajaan Jawa. Setelah berunding dengan Residen Canne, direncanakan kunjungan Puruboyo kepada Gubernur Jenderal akan jatuh pada bulan Desember. Namun semua itu menanti hasil pembicaraan Canne dengan pemerintah di Batavia. Akhirnya pada akhir November 1917, jawaban itu tiba dari Sekretaris Negara. Dalam surat resmi tersebut dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal van Limburg Stirum berkenan menerima Puruboyo di Istana Buitenzorg bagi suatu kunjungan resmi. Penerimaan ini dijadualkan berlangsung antara 4-5 Desember 1917.<sup>186</sup>

Pada hari yang dijadualkan, Puruboyo hadir di Istana Buitenzorg dan disambut oleh Gubernur Jenderal Limburg Stirum yang didampingi oleh para pejabat tinggi Belanda. Dalam pertemuan itu, van Limburg Stirum secara resmi memberikan restu dan dukungannya kepada Puruboyo sebagai calon pewaris tahta Kesultanan Yogyakarta. Hal ini juga dibuktikan bukan hanya lewat pernyataan resmi, tetapi juga dengan menetapkan Puruboyo sebagai ajudan dalam dinas luar biasa bagi Gubernur Jenderal. Hal ini berarti bahwa Puruboyo sebagai putra mahkota berhak untuk menjadi penghubung antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai wakil Sultan.

Puruboyo menerima hal tersebut dan sekaligus juga menyampaikan bahwa dirinya sebagai seorang calon raja Jawa memerlukan suatu wawasan yang luas. Hal ini diperlukan mengingat perubahan zaman yang semakin tidak terduga dan harus dihadapi. Sementara itu kondisi di Kesultanan Yogyakarta masih banyak yang perlu dibenahi untuk menyesuaikan diri terhadap proses perubahan yang terjadi. Menurut Puruboyo, hal tersebut hanya bisa dilakukan lewat pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh. Sudah saatnya seorang penguasa Jawa tidak lagi terbatas pergaulan dan wawasannya hanya di lingkungan kraton dan sekitarnya, melainkan harus mengetahui wilayah di luar negaranya - termasuk ke wilayah pemerintah pusat dan jika perlu ke luar negeri.

---

<sup>186</sup> ANRI, *Telegram Gouvernement Secretaries 26 November 1917 no. 1173*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Setelah melakukan audiensi dengan Gubernur Jenderal, Puruboyo kembali ke Yogyakarta pada pertengahan bulan Desember 1917. Persetujuan van Limburg Stirum atas permohonannya untuk mengadakan perjalanan ke luar negeri dijadikan sebagai dasar bagi Puruboyo untuk mengadakan kunjungan ke beberapa negara asing. Ketika ide ini disampaikan kepada Sultan HB VII, raja tersebut menyetujuinya dan menyampaikan permohonan Puruboyo kepada Residen Canne. Canne tidak mampu membuat keputusan, karena di samping kesibukannya yang padat, ia juga tidak berhak mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Oleh karena itu, Canne kemudian meneruskan permohonan itu kepada pemerintah di Batavia.<sup>187</sup>

Ketika menerima surat Canne tentang keinginan Puruboyo untuk mengunjungi negara tetangga, van Limburg Stirum menanyakan daerah mana yang akan menjadi kunjungannya. Puruboyo memberikan jawaban bahwa dirinya bermaksud melakukan lawatan ke Singapura dan Malaka, dengan pertimbangan bahwa di kedua tempat tersebut banyak terdapat kemiripan dengan Hindia Belanda, setidaknya dalam hal bahasa. Van Limburg Stirum menerima permohonan itu dan mengatakan harus melakukan persiapan. Untuk itu, ia memerintahkan kepada Residen Canne agar menyiapkan kepergian Puruboyo. Karena Canne tidak bisa meninggalkan Yogyakarta, ia mendelegasikan tugas ini kepada Kontrolir H. Bouquet untuk mendampingi Puruboyo. Sementara itu, van Limburg Stirum juga memerintahkan residen Belanda di kawasan Pantai Timur Sumatra sebagai daerah Hindia Belanda yang paling dekat dengan Malaka dan Singapura, agar melakukan persiapan untuk mengawasi perjalanan Puruboyo.<sup>188</sup>

Akan tetapi setelah mengadakan persiapan selama dua bulan, tiba-tiba situasi berubah. Hal ini terutama terjadi ketika dunia internasional mengalami kekacauan akibat terjadi Perang Dunia I yang melanda Eropa. Faktor pertama

---

<sup>187</sup>Canne sendiri selama pemerintahannya kurang begitu memperhatikan hal-hal tersebut. Hal ini bukan karena Canne tidak peduli terhadap hubungannya dengan raja-raja Jawa, melainkan selama pemerintahannya, tenaga yang ditempatkan di Yogyakarta untuk membantunya memerintah wilayah administrasinya sangat tidak mencukupi. Sejumlah pejabat meminta berhenti, meninggal atau pensiun dan belum mendapatkan penggantinya. Akibatnya, Canne sering dibebani dengan tugas-tugas yang membuatnya kurang memberikan perhatian pada persoalan Puruboyo. Lihat ANRI, *Memorie van Overgave Resident van Djocjakarta C. Canne, 27 April 1915 – 5 Juni 1919*, halaman 5, bundel MvO seri 2e, reel nomor 7.

<sup>188</sup>ANRI, *Brief Gouvernement Secretaris 18 Januari 1918 no. 19*, bundel *Algemeen Secretarie*.

yang menimbulkan perubahan rencana itu adalah peperangan tersebut telah meluas hingga ke kawasan Asia - terutama ketika pemerintah Cina menyatakan perang terhadap Jerman dan Austria, yang segera diikuti dengan pernyataan sikap koloni Cina di Malaya.<sup>189</sup> Faktor kedua, situasi di Singapura juga tidak kondusif. Hal ini menyusul terjadi gelombang demonstrasi oleh komunitas Cina di Singapura terhadap tuntutan Jepang kepada pemerintah Cina (*twenty one demands*) yang dianggap melemahkan dan merugikan negeri Cina.<sup>190</sup>

Situasi tersebut tentu saja membuat kunjungan Puruboyo ke koloni Inggris di Asia Tenggara ini tidak kondusif. Konsul Jenderal Belanda di Singapura telah mengirimkan berita kawat kepada pemerintah di Batavia yang menghimbau agar kunjungan Puruboyo ditunda. Pada tanggal 12 Maret 1918, pemerintah Batavia yang menerima berita dari Singapura kemudian menghubungi Residen Canne lewat telegram pada tanggal 16 Maret 1918. Canne yang menerima telegram tersebut segera menuju kraton dan menjumpai Sultan Hamengku Buwono VII dan Puruboyo. Ia memberitahu keduanya, bahwa Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memerintahkan penundaan keberangkatan Puruboyo ke Singapura dan Malaya.<sup>191</sup>

Setelah kegagalannya untuk melakukan kunjungan ke negara tetangga, Puruboyo akhirnya memutuskan untuk melakukan kunjungan ke Eropa yaitu ke Negeri Belanda. Bagi Puruboyo, kunjungan ke Belanda merupakan suatu persyaratan yang penting bagi seorang calon penguasa Jawa, karena ia melihat bahwa eksistensi suatu kerajaan di Jawa di masa depan akan terkait erat dengan kebijakan politik pemerintah Belanda, khususnya yang dibuat di Den Haag. Bagi Puruboyo, dengan melihat Negeri Belanda, ia akan memiliki kemampuan untuk berhadapan langsung dengan orang-orang Belanda secara psikologis. Jika

---

<sup>189</sup> Madeleine Chi, *China Diplomacy 1914-1918* (Cambridge, 1970, Harvard Uni. Press), halaman 128. Pemerintah Cina menyatakan perang terhadap Jerman pada bulan Agustus 1917 dan pimpinan militer Jerman memperluas kawasan perang kapal selamnya ke negara-negara lawan di seluruh dunia termasuk ke Asia Tenggara.

<sup>190</sup> C.M. Turnbull, *A History of Singapore 1819, 1975* (Singapore, 1985, Oxford Univ. Press.), halaman 133. Jepang memanfaatkan posisinya sebagai bagian dari negara Sekutu untuk mengajukan dua puluh satu tuntutan kepada negeri Cina. Karena statusnya sebagai bagian dari Sekutu, Jepang didukung oleh negara-negara Barat yang menghadapi Jerman-Austria. Tuntutan Jepang ini menimbulkan gelombang penentangan terhadap semua aktivitas Jepang termasuk ekonominya oleh orang-orang Cina di seluruh kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.

<sup>191</sup> ANRI, *Telegram Gouvernement Secretaries tanggal 16 Maret 1918 nomor 31*, bundel *Algemeen Secretarie*.

diperlukan kunjungan ini bukan hanya bersifat seremonial, melainkan ada tujuan untuk menuntut ilmu di negara tersebut mengingat pengetahuan modern dari Barat sangat diperlukan bagi perubahan zaman di Hindia, dan akan lebih tepat apabila diperoleh di negara asalnya.

Untuk kepentingan itu, Puruboyo meminta izin Sultan HB VII bagi rencana kepergiannya ke Belanda. Sultan HB VII menyetujui hal itu dan kemudian membicarakan rencana tersebut dengan residen Belanda di Yogyakarta, yaitu P.W. Jonquiere pengganti Canne. Pada tanggal 21 Juli 1919 setelah mendengar keterangan Sultan HB VII tentang keinginan Puruboyo, Jonquiere menyampaikan maksud itu kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum.<sup>192</sup>

Limburg Stirum tidak bisa begitu saja memutuskan permohonan ini. Karena hal ini langsung menyangkut pemerintah pusat, Limburg Stirum mengirimkan kabar ini kepada Menteri Koloni S. de Graaff. Pada prinsipnya Limburg Stirum menanyakan apakah Menteri Koloni de Graaff memperkenankan kedatangan Puruboyo ke Belanda. De Graaff pada dasarnya tidak merasa keberatan tetapi menyampaikan bahwa Puruboyo memerlukan pendamping agar tidak merasa kesulitan dalam berhubungan dengan para petinggi Belanda di Eropa. Selain itu pendamping ini juga akan diharapkan memantau apa yang akan dilakukan oleh Puruboyo, terutama sesuai dengan maksud kedatangannya.<sup>193</sup>

De Graaff tidak bisa memutuskan segera, tetapi menyerahkan kembali kepada Gubernur Jenderal Limburg Stirum untuk mempersiapkan segalanya bagi kepentingan perjalanan Puruboyo dari Batavia, termasuk orang yang akan ditunjuk mendampinginya. Di sini kesulitan muncul, karena pemerintah di Batavia tidak mampu menunjuk siapa yang layak menjadi pendamping, di samping juga tidak ada pejabat pemerintah yang dapat meninggalkan tugasnya khusus untuk menyertai Puruboyo dalam waktu lama di Belanda. Secara kebetulan pada awal Agustus 1919, ada seorang pejabat pemerintah yang akan kembali ke Belanda dalam rangka cuti dinas. Pejabat ini adalah G.H. van Dissel, seorang insinyur pengairan klas-2. Van Dissel adalah seorang pejabat pengairan

---

<sup>192</sup> ANRI, *Brief Gouvernement Secretaris tanggal 21 Juli 1919 nomor 119*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>193</sup> ANRI, *Brief Gouvernement Secretaris tanggal 26 Juli 1919 nomor 1*, bundel *Algemeen Secretarie*.

yang mengenal tentang psikologi dan budaya orang Jawa karena telah ditempatkan di Jawa Tengah selama beberapa tahun, sehingga dengan mudah ia bisa berkomunikasi dengan mereka. Hal ini memungkinkan Gubernur Jenderal van Limburg Stirum untuk memerintahkan van Dissel agar bersedia mendampingi Puruboyo dalam kunjungannya ke Belanda dan jika memungkinkan, menyertainya dalam aktivitas Puruboyo di sana.<sup>194</sup>

Setelah kesediaan van Dissel diperoleh, van Limburg Stirum memerintahkan Residen Jonquiere untuk memberitahu Sultan HB VII dan Puruboyo, agar Puruboyo mempersiapkan diri bagi keberangkatannya. Sebagai tindak lanjut dari pembicaraan ini, Sultan HB VII mengizinkan Puruboyo untuk meninggalkan kraton Yogya. Puruboyo meninggalkan Yogyakarta pada pertengahan Agustus 1919 dan setelah beberapa hari tinggal di Batavia, Puruboyo berangkat dengan menggunakan kapal laut dari pelabuhan Tanjung Priok pada awal September 1919 menuju Negeri Belanda.

#### **4.3 Sultan HB VII Meletakkan Jabatan**

Sejak Pangeran Putro meninggal dan pengangkatan Pangeran Puruboyo sebagai pewaris tahta di Kesultanan Yogyakarta, Sultan HB VII mulai merasakan bahwa dirinya tidak akan lama lagi menduduki tahta. Di samping usianya yang sudah mulai tua dan kondisi fisiknya yang menurun, Sultan HB VII juga merasa tertekan oleh kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dirasakan semakin mengurangi wewenang dan kewibawaannya. Reorganisasi peradilan dan reorganisasi agraria menjadi sarana utama untuk memperluas pengaruh kolonial di wilayah kekuasaan raja-raja Jawa, dan sekaligus menurunkan wibawa dan kekuasaan raja.

Sehubungan dengan hal tersebut tampak bahwa dengan alasan reorganisasi agraria, jumlah aparat yang mengabdikan kepada raja sebagai *abdi dalem* kraton perlu dikurangi. Mereka tidak sesuai lagi dengan kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan reorganisasi pemerintahan.<sup>195</sup> Ketika hal ini dikabulkan dengan pemberhentian sejumlah besar *bekel*, seiring dengan pengembalian tanah-tanah

---

<sup>194</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 7 Augustus 1919 no.2*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>195</sup> ANRI, *Memorie van Overgave Liefvriinck*, *op.cit.*, halaman 18.

apanage kepada Sultan, pemerintah Belanda mulai juga menuntut pengurangan jumlah kerabat raja (*darah dalem*) yang dianggap terlalu banyak. Jumlah mereka hendaknya dibatasi pada kerabat dekat raja, dengan tujuan agar membebaskan kraton dari beban kewajiban untuk memelihara mereka.

Hal ini cukup beralasan mengingat sejak tahun 1913, kondisi keuangan Kesultanan Yogyakarta terus menyusut, dan hanya bergantung pada pembayaran dari pemerintah kolonial.<sup>196</sup> Penghapusan apanage secara bertahap telah menghentikan persembahan upeti (*taker turun, alip, bekti*) kepada raja, sekaligus juga pungutan-pungutan tradisional lain (*tukon dodot, tukon kembang, pajendralan*). Semua hak istimewa ini bukan hanya menjadi sumber pendapatan bagi raja dan kraton, tetapi juga merupakan simbol kekuasaan raja atas kawulanya. Kini semua itu tidak lagi berlaku, karena tanah-tanah yang tidak lagi menjadi apanage, sudah terbebas dari kewajiban persembahan kepada raja. Di samping itu, tanah-tanah yang telah disewa oleh perusahaan perkebunan gula tidak lagi memberikan uang sewa, karena mereka telah menyewanya kepada para pemegang apanage sebelumnya. Akibatnya, hanya sebagian kecil saja dari para penyewa tanah yang menyetorkan uang sewanya kepada kas kraton.

Dengan pengembalian tanah-tanah apanage, maka kepemilikan tanah oleh kraton menjadi sangat luas. Namun tanah-tanah tersebut tidak lagi produktif seperti ketika dijadikan apanage. Tidak ada lagi tenaga kerja yang terikat sebagai kawula dalam hubungan ikatan primordial untuk mengerjakan tanah dan mempersembahkannya, kecuali di tanah-tanah *kejawen*, yaitu tanah-tanah yang sejak dahulu merupakan milik raja atau kraton, yang mana hubungan feodal masih tetap dipertahankan.<sup>197</sup>

Pengaruh yang pertama kali muncul dari kondisi ini adalah pada anggaran keuangan (*begroting*) Kesultanan Yogyakarta. Jika sebelum tahun 1911, yaitu sebelum berlaku peraturan sewa tanah yang baru dari pemerintah Belanda untuk

---

<sup>196</sup> Hal ini terjadi terutama salah satunya dengan pengambil alihan hak penjualan kebutuhan pokok masyarakat seperti monopoli penjualan garam, candu, pajak kayu dan sebagainya. Ini seiring dengan penerapan kebijakan garam (*zoutregie*) atau candu (*opium regie*) di tanah-tanah pemerintah. Lihat ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris, tanggal 20 Februarie 1913 nomor 486*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>197</sup> G. Schwencke, 1932, *op.cit.*, halaman 144. Dalam hal ini sebenarnya raja hanya tinggal memiliki hak penguasaan (*beschikingsrecht*), bukan lagi hak kepemilikan (*bezitsrecht*). Hak penguasaan lebih cenderung sebagai mengkoordinasi produktivitas tanah daripada memiliki wewenang memiliki hasil produksi tanah-tanah tersebut.



wilayah Yogyakarta dan Surakarta, sebagian dari hasil sewa tanah disetorkan ke kas kraton (*Sultanaatkas*), sehingga jumlahnya menjadi besar - jumlah itu terus berkurang. Akibatnya, jumlah keuangan yang ada dalam kas ini tidak mampu menutup pengeluaran rutin yang wajib ditanggung oleh kraton seperti gaji pegawai kraton yang tidak mendapatkan apanage, pengeluaran pribadi raja dan keluarganya, pengeluaran upacara, administrasi pemerintahan, pemeliharaan pasukan, serta kewajiban terhadap pemerintah Belanda sesuai dengan kontrak-kontrak politik yang dibuat.

Defisit kas ini menjadi semakin besar, sehingga beberapa kali Sultan HB VII harus mencari pinjaman untuk menutup kebutuhan itu. Bahkan sebelum peraturan sewa tanah yang baru dikeluarkan, Sultan sudah mengalami kesulitan keuangan. Dalam hal proyek pembangunan di pusat kota Yogyakarta, yang diperlukan baik bagi aspek ekonomi maupun estetika, Sultan HB VII harus berpaling pada pemerintah kolonial bagi pembiayannya. Di antaranya adalah proyek pembangunan jembatan Gondolayu di atas Sungai Code yang menghubungkan antara *kuthorojo* dan kompleks pemukiman Eropa (*Europeesch wijk*) di sebelah timurnya, harus ditunda dari perencanaannya pada tahun 1909, karena Sultan tidak mampu menyediakan dana f 40.000 yang dianggarkan sebelumnya.<sup>198</sup>

Pemerintah Batavia menyetujui pinjaman ini dengan ketentuan, bahwa dana itu akan diangsur setiap tahun tanpa pembayaran bunga. Namun ada ketentuan lain yang menyertai peminjaman ini, yaitu agar pembangunan jembatan di Gondolayu dilaksanakan oleh para insinyur pengairan dan teknik yang disiapkan oleh pemerintah pusat, sementara itu pelaksanaan pembangunan ini akan diserahkan kepada residen bagi pengawasannya. Jadi bisa dikatakan, bahwa di atas kertas jembatan Gondolayu dibangun dan diresmikan oleh Sultan HB VII, namun sebenarnya jembatan itu merupakan proyek pemerintah kolonial seutuhnya, walaupun dana yang disediakan merupakan pinjaman.<sup>199</sup>

Sebagai akibat dari kondisi ini dan juga pinjaman lain dari Sultan, pemerintah kolonial memutuskan untuk menurunkan uang subsidi tahunan yang

---

<sup>198</sup> ANRI, *Renvooi tanggal 16 Juni 1910 no. 15431*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>199</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal 8 Desember 1910 no. 12*, bundel *Algemeen Secretarie*.

diberikan kepada Sultan Yogyakarta sejak tahun 1830.<sup>200</sup> Residen PH. van Andel menerima instruksi dari Gubernur Jenderal Idenburg agar membujuk Sultan HB VII untuk membuat pernyataan kesediaan, bahwa uang pembayaran tahunan dari pemerintah kolonial diturunkan sehubungan dengan kewajiban Sultan kepada pemerintah dalam bentuk hutang. Di samping itu juga diupayakan, agar Sultan bersedia untuk menerima pembayaran tersebut tidak secara tunai melainkan angsuran setiap bulan selama dua belas kali dalam waktu setahun.<sup>201</sup>

Van Andel sendiri tampaknya tidak begitu setuju dengan rencana pemerintah pusat di Batavia tersebut, karena dianggap sulit untuk membuat Sultan HB VII bersedia menerima permintaan Idenburg dalam hal pembayaran hutang dan tunjangan. Hal ini terbukti bahwa selama beberapa minggu dalam pertemuan dengan Sultan HB VII, van Andel tidak pernah menyinggung persoalan tunjangan. Akibatnya pada pertengahan November 1910, Idenburg mengirimkan surat kembali yang mengingatkan van Andel untuk membicarakan lagi hal tersebut dengan Sultan HB VII.<sup>202</sup>

Persoalan ini tidak selesai sampai van Andel digantikan oleh Liefcrinck. Selama pemerintahannya, Liefcrinck juga tidak begitu berani membahas masalah itu dengan Sultan HB VII. Akhirnya ketika Byleveld menjabat sebagai Residen Yogyakarta, ia mengusulkan kepada pemerintah di Batavia agar menyetujui pemisahan antara kas bagi Sultan pribadi dan kas untuk Kesultanan Yogyakarta.<sup>203</sup> Dasar dari usul ini adalah bahwa Byleveld menilai Sultan lebih banyak mengambil kebijakan atas inisiatif sendiri, dan sering tidak memperhitungkan kepentingan kraton atau negaranya. Agar hal itu tidak

---

<sup>200</sup>Uang ini digunakan untuk ganti rugi atas hilangnya tanah-tanah *Monconegoro Wetan* dan *Monconegoro Kulon* setelah perang Diponegoro pada tahun 1830. Melalui perjanjian tanggal 3 November 1830, Kesultanan Yogyakarta hanya mencakup wilayah Kulon Progo, Mataram dan Gunung Kidul saja yang kemudian dijadikan sebagai wilayah Karesidenan Yogyakarta. Lihat P.W. Filet, *De Vorhouding der Vorsten op Java tot de Ned. Indische Regeering* (s Gravenhage, 1895, M. Nijhoff), halaman 112.

<sup>201</sup> ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 11 Oktober 1910 nomor 2301*, bundel *Algemeen Secretarie*. Jumlah tunjangan tahunan itu mencapai f 21.200 dan akan dibagi menjadi dua belas kali dalam setahun. Maksud pemerintah adalah agar besarnya tunjangan ini disamakan dengan angsuran pembayaran hutang yang dimiliki oleh Sultan HB VII, sehingga terjadi impas dalam pembayaran.

<sup>202</sup> ANRI, *Missive Gouvernements Secretaris tanggal 12 November 1910 nomor 2548*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>203</sup> ANRI, *Memorie van Overgave Residen Djocjakarta C. Bijleveld, 1913-1915*, reel nomor 4, seri MvO DL.

terlampau jauh berlangsung, Byleveld diperintahkan untuk mengingatkan Sultan tentang tindakannya.<sup>204</sup>

Pandangan Byleveld ini didasarkan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Sultan dan dianggap tidak berkonsultasi dengan para bangsawan tinggi lainnya di dalam kraton - meskipun terdapat dewan bangsawan yang bertugas memberi nasehat kepada raja (*rijksraad*).<sup>205</sup> Persoalannya adalah bahwa Sultan HB VII memang bermaksud untuk menampilkan diri sebagai seorang raja yang berkuasa dan besar di kerajaannya. Pada saat Byleveld tampil sebagai residen dalam pertemuan resminya dengan Sultan HB VII pada awal Juli 1914 untuk membicarakan keuangan kraton,<sup>206</sup> Sultan justru mengajukan permohonan bahwa dirinya akan melakukan renovasi besar-besaran atas kraton dan juga rumah dinas residen. Tujuannya adalah untuk persiapan memperingati acara ulang tahun Ratu Wilhelmina yang akan jatuh pada bulan Agustus 1914. Ketika Byleveld menyampaikan permohonan Sultan HB VII ini kepada Idenburg, Gubernur Jenderal itu I dengan tegas menolaknya, kecuali hanya terbatas sekadar melakukan renovasi.<sup>207</sup>

Meskipun ada penolakan Idenburg, Sultan HB VII tetap meneruskan rencana sesuai dengan kemampuannya. Ia sebaliknya mengingatkan kepada Byleveld, bahwa semua tindakannya ini dilakukan untuk menghormati Ratu Belanda, dan balik mempertanyakan kenapa pemerintah Belanda di Yogyakarta terkesan tidak mendukung langkahnya. Karena itu, Byleveld kemudian menasehati Idenburg agar mempertimbangkan beberapa permohonan dari Sultan

---

<sup>204</sup>ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 18 Mei 1914 nomor 63*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>205</sup>ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 3 Juli 1914 nomor 1936*, bundel *Algemeen Secretarie*. Byleveld diperintahkan oleh Idenburg untuk membicarakan dengan Sultan HB VII tentang hutang-hutangnya yang sudah menumpuk sejak tanggal 1 Januari 1906 sampai 1 Januari 1914.

<sup>206</sup>ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 3 Juli 1914 nomor 1668*, bundel *Algemeen Secretarie*. Byleveld datang ke kraton untuk membicarakan masalah keuangan Sultan dalam rangka reorganisasi peradilan.

<sup>207</sup>ANRI, *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 7 Juli 1914 nomor 283*, bundel *Algemeen Secretarie*. Dalam permohonannya Sultan ingin membangun kembali ruang tahta, ruang makan untuk jamuan resmi, kamar Sultan pribadi, pavilyun untuk para tamu agung dan juga beberapa bagian dari rumah dinas residen. Jelas bahwa hal ini sengaja ditunjukkan oleh Sultan HB VII untuk membuktikan bahwa dirinya masih seorang raja yang besar dan berkuasa di wilayahnya, khususnya di kraton.

HB VII untuk menambah perabotan yang ada di *bangsal kencana* dan juga di pavilyun rumah residen.<sup>208</sup>

Namun bersamaan dengan sikap Idenburg yang bersedia mengabulkan permohonan Sultan, ia juga melakukan tekanan lebih keras, agar Sultan HB VII bersedia untuk menerima pengaturan keuangan baru yang akan memisahkan keuangan pribadinya dan keuangan kraton. Hal ini diperlukan untuk melancarkan program reorganisasi yang sedang dilaksanakan di Kesultanan Yogyakarta. Tetapi sebelum menyetujuinya, Sultan HB VII meminta jaminan kepada pemerintah Belanda tentang peranan dan andilnya dalam reorganisasi itu. Setelah pemerintah Belanda menjanjikan ada ganti rugi bagi penghapusan apanage yang akan digunakan untuk membayar para bangsawan, Sultan HB VII bersedia menerima sistem pemisahan keuangan yang berlaku di kraton Yogya.<sup>209</sup>

Hal ini kemudian terwujud ketika proses reorganisasi agraria berlangsung. Pada awal Januari 1916, secara resmi semua tanah apanage dihapuskan. Untuk itu, sebuah *pranatan* baru tentang kepemilikan tanah ditetapkan, yang mana semua tanah apanage kembali menjadi milik raja dan berada di bawah wewenang raja. Semua penyewa tanah apanage yang masih berkepentingan dengan persewaan tanah akan langsung berhubungan dengan raja. Jadi secara strategis, posisi raja kembali diletakkan pada seorang penguasa tunggal, meskipun dalam arti yang sebenarnya Sultan HB VII tidak lagi memiliki wewenang langsung untuk berhubungan dengan kawulanya, khususnya yang berada di tanah-tanah sewaan.<sup>210</sup>

Sultan HB VII kemudian menuntut janji yang dibuat oleh Idenburg tentang pembayaran ganti rugi atas penghapusan status apanage. Dengan alasan tidak mampu melakukan pembayaran terhadap para bangsawan yang kehilangan haknya, Sultan HB VII meminta agar pemerintah Belanda memenuhi kewajiban

---

<sup>208</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 20 Oktober 1914 nomor 23*, bundel *Algemeen Secretarie*. Dalam dokumen ini, Idenburg memerintahkan pengiriman dana sebesar f 1175 bagi pembelian perabotan untuk kedua tempat itu. Di sini tampak arti penting yang ditunjukkan oleh Idenburg pada persoalan itu yaitu dengan mengeluarkan sebuah surat keputusan sendiri. Ini berbeda dengan berkas-berkas sebelumnya yang cukup dikeluarkan oleh Sekretaris Negara.

<sup>209</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 6 November 1914 nomor 22*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>210</sup> *Missive Gouvernement Secretaris tanggal 18 Januari 1916 nomor 120*, bundel *Algemeen Secretaris*.

ini. Idenburg mengabulkan permohonan itu dan memberikan ganti rugi sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan untuk membayar gaji – khususnya - para bangsawan, dan para birokrat kraton pada umumnya.<sup>211</sup>

Setelah persoalan ganti rugi keuangan berakhir diatasi, Sultan HB VII merasakan bahwa dirinya kini berhak kembali memegang kendali pemerintahan seutuhnya. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya sudah menghadapi berbagai persoalan, baik yang bersifat kenegaraan maupun kekeluargaan, termasuk persoalan putra mahkota dan para permaisuri. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Sultan HB VII menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi bebas membuat kebijakan. Terutama ini terjadi, ketika birokrasi kolonial semakin banyak mendominasi wilayah kerajaannya.

Akan tetapi keinginannya untuk tetap tampil sebagai seorang raja yang besar dan berwibawa masih tetap tinggi. Hal ini kemudian diwujudkan dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Selama pemerintahannya, ia membuat penertiban dalam pemakaian kain tradisional Jawa. Beberapa pola kain tertentu hanya dikhususkan untuk dipakai oleh bangsawan atau kerabat raja, dengan aturan ketat bagi mereka yang melanggar akan dijatuhi dengan hukuman. Langkah tersebut kemudian diteruskan juga pada bentuk seni lukis, seni tari dan kriya. Di masa pemerintahannya, Sultan HB VII memerintahkan pembuatan wayang kulit yang disesuaikan dengan pola batik yang diterapkan.

Pengaruh yang paling besar dalam kebijakan estetika Sultan HB VII tampak pada kesenian wayang orang atau *wayang wong*. Pada masa pemerintahannya, Sultan HB VII bukan hanya memerintahkan penertiban dalam hal busana, tetapi juga memerintahkan pementasan *wayang wong* dalam kuantitas yang lebih sering dibandingkan sebelumnya. Ia juga memerintahkan agar sejumlah cerita baru tentang *wayang wong* dibuat yang diambil dari karya sastra Mahabarata dan Ramayana, bahkan di antaranya, ia memerintahkan penggubahan cerita yang memadukan antara kedua karya tersebut.<sup>212</sup>

---

<sup>211</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal tanggal 24 Oktober 1916 nomor 50*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>212</sup> *Kagungan Dalem Serat Kanda Lampahan Rama Nitik*, koleksi kraton Yogyakarta nomor MS. No. 3/1/I/K), dan *Serat Kanda Lampahan Rama Nitis*, koleksi kraton Yogyakarta MS No. 33/1/D. Keduanya sekarang tersimpan di Tepas Panakawan Widya Budaya, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ada interpretasi mengenai perintah Sultan HB VII menyusun kedua

Di bidang seni tari dan wayang orang tersebut, Sultan HB VII memberikan perhatian yang sangat istimewa. Semua hal ini terutama terjadi ketika di antara putra-putranya, yaitu Pangeran Tejokusumo (adik Pangeran Mangkukusumo, putra dari Ratu Kencono) dan Pangeran Suryodiningrat mencetuskan ide untuk membentuk organisasi Krida Beksa Wirama pada tanggal 17 Agustus 1918.<sup>213</sup> Meskipun ini merupakan suatu lembaga yang bertujuan melestarikan seni tari gaya Yogyakarta, namun penampilan organisasi ini merupakan bentuk aktivitas berorganisasi resmi pertama dari kerabat raja.

Kemunculan Krida Beksa Wirama bisa dikatakan sebagai reaksi terhadap tindakan pemerintah kolonial yang menekan Sultan HB VII agar segera mengumumkan bahwa *abdi dalem* kraton Yogyakarta tidak boleh memasuki bentuk organisasi politik yang sejak dekade pertama abad XX mulai marak muncul di kota tersebut, seperti Budi Utomo dan Muhamadiyah.<sup>214</sup> Pengawasan pemerintah kolonial yang semakin ketat terhadap organisasi politik dan social, tidak berpengaruh pada Krida Beksa Wirama yang dianggap sebagai bentuk organisasi kesenian yang tidak akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban. Dalam organisasi ini, para *abdi dalem* kraton Yogyakarta bukan hanya bisa berkumpul dalam suatu wadah kelembagaan, tetapi juga bisa memperdalam dan mengembangkan ketrampilan dan nilai-nilai estetika mereka, khususnya

---

karya ini sebagai penggambaran untuk menggambarkan penyatuan kembali Kerajaan Mataram, yaitu dengan symbol perkawinan antara Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Mahabarata yang dikisahkan merupakan kelanjutan dari Ramayana menggambarkan peran Yogyakarta sebagai pewaris Mataram baru sementara Surakarta digambarkan sebagai pewaris Mataram lama.

<sup>213</sup>Soedarsono, *Wayang Wong : The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta* (Yogyakarta, 1984, Gadjah Mada University Press), halaman 28.

<sup>214</sup>Pendiri Budi Utomo, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo adalah seorang bangsawan kelas rendah dari Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian gerakan ini marak menyebar di wilayah *Vorstenlanden* terutama karena misinya yang akan menghidupkan dan melestarikan budaya Jawa, sesuai dengan keinginan Sultan HB VII. Hal ini terbukti ketika pada tahun 1915, Budi Utomo meningkatkan jumlah pembangunan sekolah yang berafiliasi dengannya dan mendapatkan sambutan baik dari kalangan keluarga *sentono dalem* Yogyakarta. Lihat M. Nasruddin Anshority dan G.K.R. Pembayun, *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan : Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme* (Yogyakarta, 2008, LKiS), halaman 42. Selain Budi Utomo, organisasi lain yang dekat dengan Kesultanan Yogyakarta adalah Muhamadiyah. Seperti Wahidin, KH Achmad Dahlan penghulu kraton yang tinggal di kampung Kauman pada tahun 1912 mendirikan yayasan Muhamadiyah. Meskipun tidak bergerak di bidang politik, organisasi ini menunjukkan aktivitas pergerakan dengan merekrut anggota dari kalangan kerabat kraton. Ada dugaan bahwa ide Ahmad Dahlan ini terpengaruh oleh keanggotaannya dalam Budi Utomo pada tahun 1909 di Yogyakarta. Lihat Herry Mohamad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad XX* (Jakarta, 2006, Gema Insani Press), halaman 10.

dalam bidang seni tari dan *wayang wong*.<sup>215</sup> Perhatian Sultan HB VII terlihat nyata dalam bentuk pembiayaan terhadap setiap aktivitas dan pementasan *wayang wong* dan tari-tarian. Dalam pentas-pentas ini,, Sultan HB VII seringkali mengundang para pejabat Belanda dalam bentuk acara resmi yang diadakan di kraton.

Secara umum, dengan caranya sendiri, Sultan HB VII mampu menghadapi tekanan pemerintah colonial. Sementara itu, Sultan HB VII juga secara bijaksana bisa menyelesaikan persoalan keluarga. Setelah kenaikan Pangeran Puruboyo menjadi putra mahkota, kelompok Ratu Kencono memang tidak lagi menunjukkan tuntutan untuk mengajukan Pangeran Ario Mangkukusumo sebagai pewaris tahta. Suatu pukulan berat telah menghantam kelompok ini dengan kematian salah seorang tokoh mereka yang berpengaruh di kraton, yaitu Pangeran Mangkubumi. Dalam masa berikutnya, kelompok ini tak lagi menunjukkan niatnya untuk menggoyang posisi putra mahkota. Sultan HB VII sendiri menggunakan pendekatan berbeda terhadap kerabat Ratu Kencono. Ia tidak melakukan tindakan yang keras terhadap kelompok permaisurinya itu. Bahkan Sultan HB VII menunjukkan cara-cara yang bersifat merangkul dan mengayomi. Ketika Pangeran Mangkukusumo memutuskan untuk lebih banyak tinggal di *dalemnya*, Pangeran Tejokusumo – adiknya - cenderung semakin dekat dengan Sultan HB VII.

Perhatian Sultan HB VII kepada Tejokusumo tampak, ketika Tejokusumo mulai menunjukkan minatnya pada bidang kesenian. Maka ketika pangeran itu membentuk paguyuban tari bernama Krida Beksa Wirama, Sultan HB VII memberikan dukungan sepenuhnya. Sedangkan Pangeran Mangkukusumo cenderung berkiprah di luar kraton dengan mendukung putranya RM Cokrojiyo untuk mengembangkan bentuk kesenian tradisional ketoprak. Pementasan ketoprak sebagai bentuk seni rakyat yang digelar di Alun-alun Lor, pada saat berlangsung acara Garebeg, seperti menjadi bentuk kompetisi terselubung antara dua pangeran itu. Karena ketika itu, bersamaan waktunya dengan kegiatan

---

<sup>215</sup>Clara Brakel Papenhuizen, *Classical Javanese dance : The Surakarta tradition and its terminology* (Leiden, KITLV Press), halaman 17. Dasar pendidikan pada Krida Beksa Wirama mencakup orientasi alam pikiran, kepercayaan, kejiwaan, sikap batin, lewat gerak tari dalam tatanan simbolik dan bernilai tinggi.

Tejokusumo menggelar pentas *wayang wong* yang diadakan di Pagelaran Kraton yang didukung Sultan HB VII.<sup>216</sup>

Persaingan antar anggota kerabat raja memang tidak lagi mengarah kepada ranah politik. Akan tetapi tantangan dari kelompok keluarga yang lain masih ada. Ratu Wandan ( Ratu Kencono *sepuh*, yang sudah di-*kebonake*) yang telah diasingkan dari kraton, ternyata muncul kembali dan mengajukan tuntutan kepada Sultan HB VII mengenai statusnya. Ia telah menikahkan putrinya dengan Raden Mas Surodirjo dan tinggal di Madiun, daerah asal kakeknya Pangeran Alibasah Prawirodirjo. Dengan keberadaan menantunya, Ratu Wandan merasa bahwa kini dirinya juga berhak mengajukan menantunya sebagai pewaris tahta, atau setidaknya mendapatkan perubahan status dari Sultan HB VII. Ketika ia masih berstatus sebagai permaisuri dengan gelar Ratu Kencono, memang dirinya tidak memiliki seorang putra. Menantunya yang lain Pangeran Suryaningalogo bersama ibunya telah diasingkan ke Menado pada tahun 1883, karena terlibat dalam usaha untuk merebut status putra mahkota dari Pangeran Achadiat. Saat itu, Ratu Wandan merasa bahwa Raden Mas Surodirjo berhak menuntut kedudukan tersebut. Akan tetapi mereka menyadari bahwa status sebagai keturunan Sentot kembali akan menjadi ganjalan, terutama dari pemerintah Belanda. Oleh karena itu, Surodirjo kemudian menyampaikan keinginan ini kepada pemerintah melalui Residen Madiun, dengan merujuk pada keputusan pemerintah tahun 1830 mengenai penahanan Sentot dan keputusan tahun 1857 mengenai grasi yang diberikan kepada keluarganya.<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup>Barbara Hatley, *Javanese Performances on an Indonesian Stage : Contesting Culture, embracing change* (Singapore, 2008, Asian Studies Association of Australia), halaman 98. Ketoprak ini terus berkembang pesat pada tahun 1930-an di Yogyakarta dan dikenal dengan nama Ketoprak Mataram. Hal ini merupakan reaksi terhadap kesenian wayang orang di kraton yang merupakan bentuk kesenian elit. Ketoprak merupakan bentuk seni drama yang tumbuh di kalangan rakyat dan diiringi dengan music lesung. Ketika Cokrojiyo membentuk kelompok ketopraknya dengan iringan music gamelan dan menampilkan di Alun-alun, penampilan ini menjadi simbol penentangan terhadap bentuk kesenian elit di kraton.

<sup>217</sup>Alibasah Sentot Prawirodirjo tertangkap Belanda pada tanggal 17 Oktober 1829 berdasarkan Perjanjian Imogiri. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa Sentot bersedia menyerah tetapi harus diperlakukan bukan sebagai tawanan melainkan sebagai seorang panglima dari suatu kesatuan yang otonom dan berada di bawah perintah panglima tertinggi Belanda. Oleh karena itu ia kemudian digunakan oleh Belanda untuk menghadapi kaum Paderi. Namun kerjasamanya di Minangkabau dengan raja Bagagarsyah dari Pagaruyung, khususnya dalam hal perdagangan kopi gelap di luar monopoli Belanda di Batipuh, membuat panglima Belanda Jenderal Mayor Cochius (yang menangkap Sentot di Imogiri) mencabut statusnya dan membuangnya ke Bengkulu sebagai tahanan politik. Sentot meninggal di Bengkulu pada tanggal 17 April 1855. Lihat Soekanto, *Sentot*



Ketika menerima desakan dari kelompok Wandan ini, Gubernur Jenderal van Limburg Stirum memerintahkan Residen Madiun AJH. Eyken untuk menyelidiki kembali pengaruh dan eksistensi mereka di daerahnya.<sup>218</sup> Eyken kemudian melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan tembusan keputusan pemerintah tentang pemberian pengampunan pada keluarga Sentot. Setelah tembusan berkas itu diberikan kepada Surodirjo, ia dan ibunya mengirimkan permohonan kepada Sultan HB VII, agar diperkenankan kembali ke kraton dan mendapatkan statusnya.<sup>219</sup>

Pada akhir bulan Oktober 1918, Sultan HB VII menerima permohonan ini. Ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal van Limburg Stirum bahwa tentang permohonan mendapatkan status khusus bagi Surodirjo dan Ratu Wandan tidak mungkin lagi terwujud, karena kedudukan putra mahkota sudah diisi oleh Puruboyo. Status Ratu Wandan juga bukan permaisuri lagi, melainkan sebagai orang yang diasingkan. Meskipun keputusan pengampunan pemerintah kepada keluarga Sentot sudah diberikan, status Wandan tidak pernah dicabut sebagai orang yang diasingkan. Namun Sultan HB VII bersedia untuk mengabulkan pertimbangan yang diberikan oleh pemerintah mengenai pemberian tunjangan hidup bagi mereka.<sup>220</sup>

Pada tanggal 1 Pebruari 1919, Sultan HB VII melalui Residen Canne menyampaikan kesediaannya memberikan tunjangan tersebut lewat pemerintah kolonial. Pemerintah di Batavia kemudian memutuskan, bahwa besarnya tunjangan disesuaikan hanya untuk kebutuhan hidup primer bagi Ratu Wandan, Surodirjo dan istrinya. Residen Eyken menerima perintah untuk memberikan uang setiap bulan kepada ketiga orang itu sebesar f 15. Di samping itu, pemerintah juga memberikan keputusan yang tegas, bahwa Ratu Wandan dan kerabatnya tidak lagi diperkenankan mencampuri persoalan di Kesultanan Yogyakarta. Jika ketentuan ini dilanggar, status mereka akan diubah menjadi orang buangan dan

---

*alias Alibasah Abdulmustopo Prawirodirdjo Senopati Diponegoro* (Jakarta, 1951, Poestaka Aseli), halaman 22. Cochius menggunakan perantara adiknya bupati Madiun, Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot agar bersedia menyerahkan diri kepada Belanda.

<sup>218</sup> ANRI, *Brief Gouvernement Secretaris tanggal 1 Februarie 1918 nomor 47*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>219</sup> ANRI, *Renvooi tanggal 14 Oktober 1918 nomor 32959*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>220</sup> ANRI, *Brief Gouvernement Secretaris tanggal 31 Desember 1918 nomor 3376*, bundel *Algemeen Secretarie*.

diasingkan ke luar Jawa.<sup>221</sup> Ratu Wandan dan Surodirjo menerima keputusan tersebut dan sejak itu mereka tetap tinggal di Madiun dan tidak pernah lagi terdengar beritanya di kraton Yogya.

Selain menghadapi kelompok Ratu Wandan, Sultan HB VII juga disibukkan dengan persoalan kerabat lainnya yang juga mengajukan tuntutan bagi statusnya. Seorang petugas rumah pegadaian milik pemerintah di Imogiri, Raden Mas Baron Keswari, menyatakan bahwa dirinya adalah seorang putra Sultan HB VII. Pada tanggal 1 April 1916, ia mengirimkan surat kepada Residen Canne agar bersedia menjadi perantara menyampaikan hal tersebut kepada Sultan, dengan harapan agar dirinya diberi status yang layak di kraton. Akan tetapi karena di dalam suratuntutannya itu juga disampaikan, bahwa pemerintah kolonial dianggap tidak berhak mencampuri urusan kraton dan kerabat raja, Canne justru tidak menyampaikan hal itu kepada Sultan HB VII, melainkan memberhentikan Keswari dari statusnya sebagai pegawai pegadaian dan melakukan pemeriksaan kepadanya. Sejak itu, Baron Keswari tidak lagi terdengar beritanya.<sup>222</sup>

Kasus keluarga lain yang melanda Sultan HB VII adalah putranya Pangeran Ario Suryo Mataram. Jika pada kasus-kasus lain dampak yang muncul cenderung bersifat negatif, yaitu dengan pemisahan lebih jauh antara Sultan dan kerabatnya, pada kasus Suryo Mataram hasilnya justru positif yaitu mendekatkan kembali pangeran ini dengan Sultan. Pangeran Suryo Mataram adalah putra Sultan HB VII yang sejak tahun 1900 diasingkan oleh Belanda, karena diduga membahayakan keamanan dengan membentuk suatu padepokan dan mengajarkan suatu filsafat Jawa. Dengan jumlah pengikutnya yang banyak, mobilisasi massa dengan mudah dilakukan. Ketika hal itu dianggap beresiko terhadap potensi kerusuhan, pemerintah memutuskan menyingkirkan Suryo Mataram. Atas keinginan Sultan HB VII, Pangeran Suryo Mataram dikembalikan ke Yogyakarta. Pemerintah Belanda mengabulkan dengan syarat bahwa pangeran ini harus menghentikan kegiatannya mengajarkan filsafat kebatinan dan pengumpulan massa yang menjadi murid-muridnya. Jika ia tidak bersedia, maka status

---

<sup>221</sup> ANRI, *Brief Gouvernement Secretaris* tanggal 6 Maret 1919 nomor 615, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>222</sup> ANRI, *Besluit van Gouverneur Generaal* tanggal 28 Juni 1916 nomor 55, bundel *Algemeen Secretarie*.

pangerannya akan dicabut. Suryo Mataram sendiri kemudian bersedia meletakkan statusnya sebagai seorang bangsawan tinggi, tetapi Sultan HB VII tetap mengizinkannya untuk tinggal di dalam kompleks kraton. Akhirnya sejak bulan Juli 1920, pangeran ini tinggal di kraton dengan gelar Ki Ageng Suryo Mataram.<sup>223</sup>

Setelah menghadapi berbagai persoalan yang penting dan menentukan bagi masa depan Kesultanan Yogyakarta selama masa pemerintahannya, Sultan HB VII mulai menunjukkan gejala-gejala kemunduran fisik. Hal ini terutama sangat jelas terjadi sejak kepergian Puruboyo ke Belanda pada akhir tahun 1919. Memasuki tahun 1920, kondisi fisik Sultan HB VII merosot drastis dan sejumlah penyakit mulai muncul, di samping usianya yang sudah mendekati 81 tahun.

Pada bulan Maret 1920, Sultan HB VII jatuh sakit dan terbaring di dalam kamar tanpa bisa lagi memimpin pemerintahan. Hanya residen dan patih yang diperkenankan untuk memasuki kamar tersebut dengan maksud menjalankan roda pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta, di samping kerabat dekatnya. Berita tersebut kemudian sampai di Kesultanan Surakarta. Sunan PB X, menantunya, berniat untuk menjenguk mertuanya. Ia kemudian meminta izin kepada Residen Harloff di Surakarta tentang niatnya berkunjung ke Kraton Yogyakarta. Harloff menasehatkan bahwa kunjungan seorang raja kepada raja yang lain, tentu saja akan memerlukan suatu upacara resmi dan ini membutuhkan banyak persiapan serta biaya. Untuk mengatasi hal tersebut, Sunan PB X bermaksud mengadakan kunjungan pribadi antara menantu kepada mertua. Dengan demikian, pada tanggal 6 Maret sampai dengan 8 Maret 1920, Sunan PB X secara diam-diam dan menyamar sebagai orang biasa, mendatangi Kraton Yogya dan bertemu dengan Sultan HB VII.<sup>224</sup>

Kondisi kesehatan Sultan HB VII yang semakin lemah dan memburuk ini kemudian menjadi pembicaraan di kalangan para pejabat Belanda. Bahkan pemerintah pusat di Batavia telah mulai berpikir tentang pergantian tahta di Kesultanan Yogyakarta. Hal ini menjadi bahan pembicaraan antara Gubernur Jenderal Limburg Stirum dan residen Yogya yang baru, Jonquiere, pada bulan

---

<sup>223</sup> ANRI, *Agenda 5 Juli 1920 nomor 737*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>224</sup> ANRI, *Agenda tanggal 4 Maret 1920 nomor 9216*, bundel *Algemeen Secretarie*.

Agustus 1920.<sup>225</sup> Menurut Jonquiere, persoalan pergantian tahta bukan menjadi masalah sulit mengingat status putra mahkota sudah ada, meskipun yang bersangkutan masih berada di Belanda. Namun waktu yang akan dipilih untuk membicarakan hal itu dengan Sultan HB VII harus menunggu, terutama saat itu Sultan HB VII sedang dihadapkan pada perkawinan putrinya dengan Mangkunegoro VII.

Setelah perkawinan ini berlangsung pada bulan September 1920, kondisi kesehatan Sultan HB VII yang tidak semakin baik kembali menjadi fokus perhatian pemerintah Belanda. Pada awal Desember 1920, beberapa pejabat Belanda di Batavia bahkan telah menyiapkan rancangan *verklaring* dan *akta van verband* yang akan ditandatangani oleh pewaris tahta dan calon raja baru di Yogyakarta.<sup>226</sup>

Selama bulan Desember 1920 praktis Residen Jonquiere bersama Patih Danurejo VII adalah orang-orang yang melaksanakan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Rencana menurunkan tahta Sultan HB VII semakin bulat dengan usul Jonquiere untuk memanggil kembali Puruboyo ke Yogyakarta dengan tujuan menerima status pewaris tahta. Bahkan pihak swasta dilibatkan juga yaitu kantor *Nederlandsch Handelsmaatschappij* yang oleh pemerintah Belanda diminta menyiapkan dana pinjaman sebesar f 30.000 untuk acara pergantian tahta.<sup>227</sup> Sambil menunggu kedatangan Puruboyo, pemerintah di Batavia memerintahkan Jonquiere untuk menyusun acara yang akan berlangsung dengan pergantian tahta di Kesultanan Yogyakarta.<sup>228</sup> Dengan demikian, disadari atau tidak, Sultan HB VII sudah berada di akhir era kekuasaannya sebagai seorang raja Jawa. Peristiwa penurunan Sultan ini hampir serupa dengan yang terjadi dengan pada Sultan HB II. Hal yang membedakan, pergantian Sultan HB VII kepada putranya, tidak menimbulkan friksi antara ayah dengan anak, seperti yang terjadi pada Sultan HB II dengan Suktan HB III.<sup>229</sup>

---

<sup>225</sup> ANRI, *Agenda tanggal 27 Agustus 1920 nomor 1044*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>226</sup> ANRI, *Agenda tanggal 2 Desember 1920 nomor 1406*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>227</sup> ANRI, *Telegram Gouvernement Secretaris tanggal 4 Desember 1920 nomor 2277*, bundel *Algemeen Secretarie*. Dana ini juga digunakan untuk menutup hutang-hutang Sultan HB VII yang jatuh tempo pada kas Kesultanan karena saat itu deficit anggaran tidak bisa teratasi.

<sup>228</sup> ANRI, *Agenda tanggal 30 Desember 1920 nomor 1511*, bundel *Algemeen Secretarie*.

<sup>229</sup> Djoko Marihandono dan Harto Juwono, 2008, *Sultan Hamengku Buwono II : Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*, Yogyakarta : Banjar Aji Production, halaman 147 – 148.